



W A R T A ANGGARAN

MAJALAH KEUANGAN PUBLIK

Percepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan
Kawal APBN 2024





DAFTAR ISI

WARTA ANGGARAN

EDISI 46

OPINI

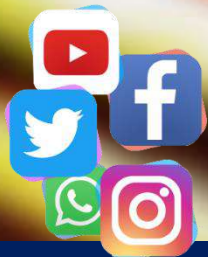
- 4 LINTAS PERISTIWA
- 8 EKSPOSUR
- 12 DARI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
- 13 LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

LAPORAN UTAMA

- 17 MAKRO EKONOMI 2024 YANG OPTIMIS DAN REALISTIS
- 22 APBN 2024: PERCEPAT PEMBANGUNAN MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI
- 25 INOVASI DAN DIVERSIFIKASI PNPB JAGA KEBERLANJUTAN SUMBER PENDAPATAN NEGARA
- 30 APBN 2024: OPTIMISME DI AKHIR TAHUN PEMERINTAHAN

- 65 SUPLEMEN
- 70 LIFE STYLE
- 74 WORK LIFE
- 76 TRAVELING
- 79 POJOK PUISI

- 36 STRATEGI KEBIJAKAN OPTIMALISASI PNPB K/L
- 40 ASA TUNTASKAN KEMISKINAN EKSTREM
- 43 MELIHAT NTP KEMBALI SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI
- 48 OPTIMALISASI PNPB KEMENLU
- 53 MERABA KINERJA BUMN PENYETOR PNPB 2024
- 59 JASA LAYANAN VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



Follow Us
@Ditjenanggaran

Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
 Redaktur : Mega Meilistya, Akhmad Tamzis Hudi, Angling Nugroho K, Muhammad Mansur Chisni, Endar Dwi Romaniatun, Niken Ajeng Lestari, Heru Winarto, Abdurrahman Imam P, Andri Sukmana.
 Penyunting/editor : Regita Triastika, Ijlal Mochamad Ready N.
 Desain Grafis/Photografer : Afif Mifta Khoiriza, Trio Kurnia D, Muchamad Irfan.
 Sekretariat : Fitri Anggreni.
 Alamat Redaksi : Gedung Sutikno Slamet Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710 Telepon (021)3866117 pst. 8009. E-mail : ortala.dja@kemenkeu.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



SAPA Anggaran Meraih Penghargaan Platinum dan Gold pada TBCCI 2023



www.anggaran.kemenkeu.go.id



Verifikasi Capaian DLIs, Sekretariat PforR JKN Reforms Jalin Kerja Sama dengan BPKP

2 Agustus 2023



Pada hari Selasa, 2 Agustus 2023 dilakukan koordinasi penyusunan pedoman verifikasi DLI'S PforR JKN Reforms antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, DJSN dan Kemenkeu selaku *implementing agency* dengan Tim Kesekretariatan yang dipimpin DJA selaku *executing agency*. Pembahasan ini difokuskan kepada DLI yang memiliki target DLR yang capaiannya akan dilaporkan di tahun ini.

Beberapa hal yang didiskusikan dalam penyusunan pedoman verifikasi ini seperti persamaan persepsi atas protokol verifikasi (memitigasi risiko perbedaan pengakuan ketercapaian antara *Executing/Implementing Agency*, World Bank, dan IVA) untuk seluruh DLR, penentuan wilayah sampel yang akan diverifikasi dan protokol verifikasi untuk DLR yang berubah sesuai hasil *Mission* World Bank JKN reform pada bulan Juni lalu.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG APBN

7 Agustus 2023

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan APBN, DJA kembali mengadakan acara konsultasi publik terkait RUU APBN 2024 dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DJA. Acara konsultasi publik kali ini dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta yang berasal dari kalangan masyarakat umum, perwakilan dari ASN pemerintah pusat maupun daerah, kalangan mahasiswa, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil (OMS).

Mengusung tajuk "Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024-Semakin Kredibel dan Transparan", acara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN TA 2024 peran strategis APBN dalam menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global menuju penguatan ketahanan fiskal.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)

2023





**21 September
2023**

**Tok! RAPBN 2024
Disepakati**

Rancangan APBN 2024 yang telah dibahas selama kurun waktu 2 bulan antara Pemerintah dengan DPR-RI, resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna). Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah dan Anggota Dewan memiliki kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.

Resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global selama ini akan menjadi pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)

**5 Oktober
2023**

**Validasi Volume
NTPN via SIMBARA
Diberlakukan**

Sejalan dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2023, sistem Validasi Volume NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) melalui Sistem Informasi Mineral & Batubara Antar K/L (SIMBARA) diimplementasikan sebagai bagian dari strategi terbaru untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara. Langkah ini dilakukan melalui sinergi proses bisnis dan data antar Kementerian/Lembaga, membawa pelaksanaan kebijakan PNBP pada level yang lebih tinggi dan efisien.

Dalam kerangka ini, validasi volume NTPN menjadi fokus utama. Eksporir dan importir harus memastikan kebenaran dan volume NTPN melalui SINSW (Sistem Informasi NTPN). Jika data tidak akurat, LS (Laporan *Surveyor*) atau SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tidak akan terbit. Eksporir tidak dapat menggunakan NTPN yang telah penuh, sementara importir dapat menggunakan kembali NTPN dengan volume tersisa untuk penerbitan SPB.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)

Tim Terpadu Monitoring JKN Reforms di Kota Tepian

6 Oktober
2023

DJA dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Tim Kesekretariatan Monitoring JKN *Reforms and Result Program*, terlibat aktif dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia, bersama sama dengan unit *Executing Agency* Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan. Tim Monev Terpadu mendatangi Dinas Kesehatan Pemkot, Puskesmas, Rumah Sakit dan BPJS di Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh gambaran yang lengkap terkait tantangan dan kendala atas capaian *Disbursement Link Indicator* (DLI).

Dalam rangka capaian DLI 1, yaitu peningkatan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), disebutkan bahwa Kemenkes mengimplementasikan *clinical pathway* pada FKTP. Namun komitmen Kemenkes yang menetapkan agar FKTP tidak hanya menyediakan layanan kuratif namun juga layanan promotif, preventif, skrining, dan manajemen kasus menyebabkan Kemenkes bermaksud melakukan amandemen atas DLI tersebut.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)

Final Olimpiade APBN

31 Oktober
2023

Setelah melalui perjalanan panjang dari babak awal sampai semifinal, akhirnya Olimpiade APBN sampai pada tahap Final. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 4.010 tim dengan total 12.030 siswa SMA yang mengikuti Lomba Olimpiade APBN 2023. Pada babak final, tersisa 4 tim dengan 12 siswa yang mengikuti kompetisi.

Babak final diselenggarakan di Gd. Dhanapala Kementerian Keuangan yang juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan dan jajaran pejabat tinggi pratama. Pada tahap final ini, secara berurutan, juara pertama hingga keempat lomba tersebut dimenangkan oleh tim SMA Negeri Insan Cendekia Kota Batam, SMA Negeri 6 Kota Tangerang, SMA Negeri 1 Tabanan, SMA Negeri 3 Palopo.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)



PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PAK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

**27 Oktober
2023**

Uji Publik Rancangan Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2019

Guna mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan, pada tanggal 25 – 27 Oktober 2023 telah dilakukan kegiatan uji publik atas rancangan perubahan PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta dihadiri oleh perwakilan dari tim PAK dan pengguna layanan.

Perubahan PP tersebut mempertimbangkan beberapa hal antara lain perlunya pengaturan layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, adanya kebijakan pemerintah yang perlu diakomodir dalam rangka mendorong perekonomian nasional, serta perlunya dilakukan simplifikasi pengaturan jenis dan tarif PNBPN. [Klik untuk berita selengkapnya](#)

Kemenkeu Dukung Penguatan TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik

**8 November
2023**

Kementerian Keuangan bersama LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik sebagai rangkaian tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada LPP TVRI. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari mitra LPP TVRI baik di pusat maupun di daerah tersebut diselenggarakan secara hybrid, yaitu luring di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta dan daring melalui aplikasi zoom meeting pada Rabu, 8 November 2023.

[Klik untuk berita selengkapnya](#)



Eksposur

Cilentung, 21 Oktober 2023 Merintis Desa Wisata Jempolan Penghasil Buah Durian

Teks Afif Mifta Khoiriza Foto Afif Mifta Khoiriza

Menyemarakkan perayaan Hari Oeang ke-77 (HORI 77), Kementerian Keuangan melaksanakan Bakti Sosial di Desa Cilentung, Pandeglang, Banten. Terdapat 300 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu pada Desa Cilentung, Sanghyangdekdek, dan Koranji serta 50 paket perlengkapan sekolah yang dibagikan kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Maarif.

Kegiatan Bakti Sosial diawali dengan senam pagi bersama sekaligus pengecekan kesehatan oleh para tenaga kesehatan dari Balai Kesehatan Kementerian Keuangan untuk memastikan kesehatan dan kebugaran masyarakat di ketiga desa tersebut dalam keadaan terjaga dengan baik.



HORI 77

KEUANGAN

atan | Serah Terima Bantuan Penampungan Air |
Tulis Sekolah Pengelolaan Dana Desa



Dharma Wanita Persatuan
Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan

Pengarahan:
Whiteboard, Sound System, &
Paket Peralatan Kebersihan

BAKTI SOSIAL HORI 77
KEMENTERIAN KEUANGAN

7 Hari Oeang

Cititung, 21 Oktober 2023





Selain memberikan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan sekolah, bakti sosial kali ini juga menjadi ajang bagi Kementerian Keuangan untuk merintis desa wisata buah durian. Durian dipilih menjadi komoditas utama karena memiliki daya tarik yang sangat besar. Dikenal sebagai "Raja Buah" di berbagai daerah di Indonesia, durian memiliki keunikan baik di sisi luar dan dalam buahnya. Pada sisi luar, durian memiliki kulit keras dan berduri sedangkan pada sisi dalam yakni buahnya, durian memiliki daging yang tebal dan lembut dengan kandungan nutrisi tinggi dengan aroma khas yang kuat.

Perintisan ini dimulai dengan penanaman perdana pohon durian oleh jajaran pimpinan Kemenkeu, 3 Pilar Pemerintah Desa, dan Kepala BPDAS Citarum Ciliwung beserta jajaran. Selanjutnya untuk mengakselerasi memperluas area penanaman pohon durian, BPDAS Citarum Ciliwung memberikan dukungan bantuan berupa 1500 bibit unggul durian yang akan ditanam di ketiga desa penerima bantuan yakni Desa Cilentung, Sanghyangdekdek, dan Koranji.



Tidak hanya sampai di penanaman bibit pohon saja, bakti sosial kali ini juga membantu desa tersebut untuk merawat bibit-bibit yang ditanam melalui pemberian bantuan tandon air untuk pengairan lahan dan kebutuhan warga. Tandon air ini memudahkan warga yang awalnya mesti mengambil air dari curug yang jaraknya sangat jauh dari pemukiman, kini sudah bisa memanfaatkan air melalui tandon yang ada disekitar rumah yang mereka huni selama ini. Setelah bibit-bibit tersebut tumbuh dan berkembang, agar memaksimalkan manfaat dari pendapatan wisatawan bagi masyarakat dibutuhkan pengelolaan anggaran desa yang baik. Maka dari itu Kementerian Keuangan pada kesempatan kali ini juga memberikan sosialisasi pengelolaan dana desa agar pengelolaan anggaran yang dimiliki desa dapat lebih kreatif dan akuntabel.

Harapannya, dengan pemberian bantuan yang sangat komperhensif ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas ekologi dari desa yang mendapatkan bantuan bibit unggul durian, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi dari seluruh warga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada perintisan desa wisata durian ini. Semoga cita-cita ini dapat terwujud sehingga kedepan bisa menjadi contoh bagi desa yang lain untuk melakukan hal yang sama atau lebih kreatif lagi dalam meningkatkan taraf perekonomian desanya.





Indonesia terus mengalami kemajuan menuju negara maju meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan ekonomi global dan ketidakpastian. Bersama dengan Tiongkok dan India, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama satu dekade terakhir. Namun, setelah pandemi, ada tantangan besar yang muncul, termasuk ketegangan geopolitik tinggi, potensi pandemi berikutnya, perubahan iklim, dan dampak disrupsi digital.

Proyeksi ekonomi global tahun 2024 menunjukkan perbaikan, dengan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,0 persen menurut *Outlook* Ekonomi Dunia (IMF, Juli 2023). Sementara itu, ekonomi negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, diproyeksikan tumbuh sebesar 5,0 persen pada tahun 2024.

Indonesia berhasil kembali ke status negara berpendapatan menengah atas setelah mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut, menciptakan pemulihan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebesar 5,2 persen dengan fokus pada perbaikan kualitas, termasuk penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, penanggulangan ketimpangan pendapatan, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta peningkatan nilai tukar bagi petani dan nelayan. Capaian pembangunan ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Fokus kebijakan fiskal tahun 2024 yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menitikberatkan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Alokasi dana juga difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam, serta reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi. Pendekatan-pendekatan strategis ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Tim Redaksi



STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN



Berisi Standar Pelayanan Penyelesaian Revisi Anggaran dari pengajuan revisi oleh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) hingga ditandatanganinya Surat Pengesahan atau Penolakan usulan revisi anggaran oleh Direktur Anggaran Bidang.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN:

- ✓ Persyaratan
- ✓ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- ✓ Jangka Waktu Pelayanan
- ✓ Biaya/Tarif
- ✓ Produk Pelayanan
- ✓ Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

PERSYARATAN

Unit Eselon I K/L menyiapkan kelengkapan dokumen berikut:



SURAT USULAN REVISI ANGGARAN

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I K/L
Softcopy dengan format PDF, ukuran maksimal 100 Mb



SURAT PERNYATAAN PEJABAT ESELON I

Softcopy dengan format PDF, ukuran maksimal 100 Mb



ARSIP DATA KOMPUTER (ADK)

dihasilkan dari aplikasi SAKTI, Tipe File .S21, ukuran maksimal 100 Mb



SURAT PERNYATAAN DARI PIHAK KETIGA

dalam hal Usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan barang/jasa yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda.



LAPORAN HASIL REVIU APIP K/L

dalam hal usulan revisi anggaran berkaitan dengan pagu anggaran berubah



RKBMN YANG TELAH DISETUJUI DJKN

dalam hal usulan revisi berkaitan dengan RO berupa BMN baru yang akan dihasilkan



SP SABA DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN

Dalam hal pergeseran anggaran dari BA SABA ke BA K/L.



USULAN REVISI ANGGARAN

Disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan melalui aplikasi SATU Anggaran dan Aplikasi SAKTI

Dalam hal sistem aplikasi belum tersedia atau sedang dalam gangguan (terlebih dahulu akan diumumkan oleh DJA), maka unit eselon I K/L pengusul menyampaikan usulan revisi melalui alamat Surat Elektronik (Surel) pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id dengan menggunakan surel berdomain .go.id yang telah terdaftar di pangkalan data Direktorat Jenderal Anggaran

Dan apabila dalam hal surat elektronik (surel) pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id tidak dapat diakses (terlebih dahulu akan diumumkan oleh DJA), maka pengusul menyampaikan usulan revisi secara manual di konter pusat layanan DJA. Selanjutnya pusat layanan DJA menyampaikan usulan revisi ke Direktorat Anggaran Bidang

The Best
Asia

PRODUK LAYANAN

PRODUK PELAYANAN INI ADALAH **SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN (SPRA)** ATAU **SURAT PENOLAKAN USULAN REVISI ANGGARAN** OLEH DIREKTUR ANGGARAN BIDANG A.N. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LAYANAN INI **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** ATAU **GRATISS**

FREE

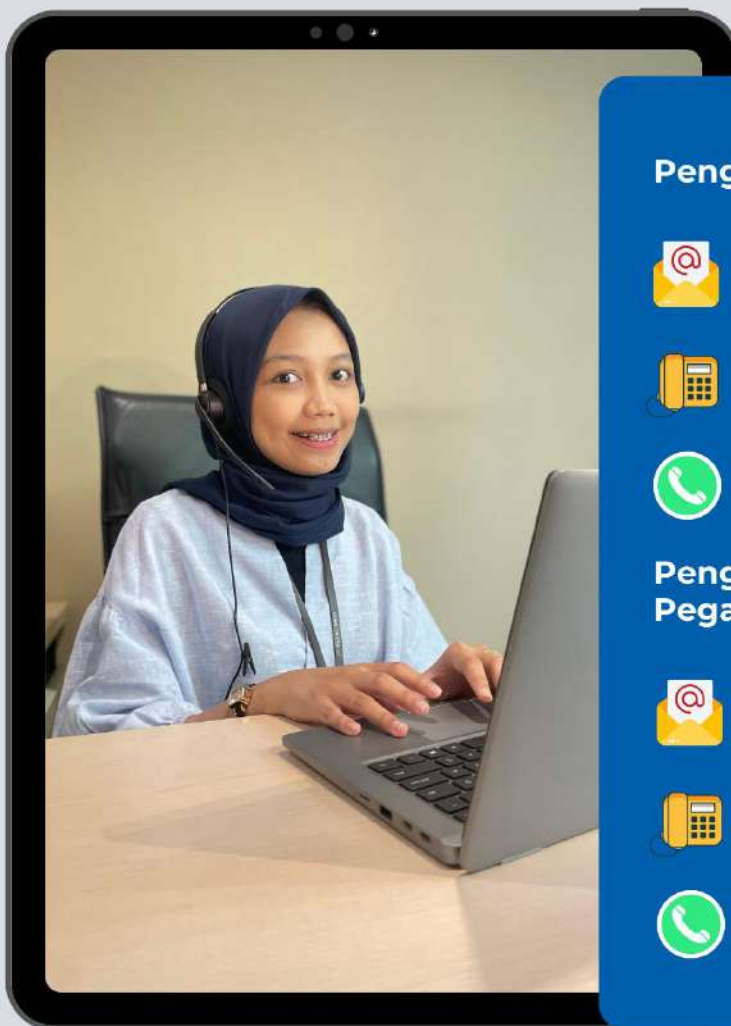
Jangka Waktu Pernerbitan Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) adalah paling lama **1 (satu) hari kerja** terhitung sejak penelaahan selesai dilaksanakan, dokumen sebagaimana dipersyaratkan diterima lengkap dan ADK diterima valid oleh SPAN.

apabila dokumen dan ADK diterima sistem aplikasi **dias jam 15.00 WIB**, maka proses dihitung mulai hari kerja berikutnya.






**#SOBATANGGARAN
BISA MEMBERIKAN SARAN DAN MASUKAN
ATAU PENGADUAN ATAS PELAYANAN INI
DI SALURAN BERIKUT :**



Pengaduan Layanan/Proses Bisnis:

 pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id

 114090 ext.2

 0811 8300 931

**Pengaduan Kode Etik/Disiplin
Pegawai DJA:**

 pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

 (021) 386 6116

 0811 1646 116

Makro Ekonomi 2024: Optimis dan Realistis

Angling N. Kemenangan,
Direktorat Penyusunan APBN



Foto: M. Ijlal

Dalam pidato penyampaian pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN TA 2024 pada Rapat Paripurna DPR, 21 September 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa APBN harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung berbagai agenda pembangunan termasuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Berbagai tantangan yang menggelayuti, mulai dari inflasi hingga perang Rusia-Ukraina yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia perlu diantisipasi oleh Pemerintah melalui kebijakan APBN yang tepat dan akurat. APBN harus senantiasa menjadi instrumen yang sehat dan

sustainable dalam menyokong fundamental perekonomian dan menunjang berbagai program pembangunan Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi makro ekonomi Indonesia tahun 2024 sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian tahun 2023. Prospek pemulihan ekonomi dunia sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan masih akan tertahan akibat perlambatan ekonomi global, seperti tekanan di sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (*debt distress*), dampak eskalasi perang Rusia-Ukraina, tingkat inflasi yang persisten tinggi, dan suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Meskipun demikian, tersiar kabar baik dari IMF. Menurut laporan *World*



Economic Outlook IMF, yang dirilis bulan Juli 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan stabil di kisaran 5 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 diperkirakan akan berada kisaran 3,0 persen, dan 5,0 persen untuk negara berkembang di kawasan Asia. Perekonomian Indonesia tahun 2024 diproyeksikan akan terus membaik dan resilien di tengah risiko dan ketidakpastian global.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental perekonomian Indonesia yang relatif kuat, serta berbagai kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent*, Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 yang optimis dan realistis sebagai berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024

No	Asumsi Makro	RAPBN 2024	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2
2	Laju Inflasi (%)	2,8	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10 tahun (%)	6,7	6,7
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/Barel)	80	82
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	625	635
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.033

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan akan berada pada kisaran 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro yang kuat dan percepatan transformasi ekonomi akan menjadi kunci dalam menunjang laju perekonomian tahun 2024. Berbagai upaya menjaga stabilitas harga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Aktivitas konsumsi masyarakat dan Pemerintah diperkirakan akan meningkat, terutama di tengah penyelenggaraan pemilu pusat dan daerah. Kinerja sektor perdagangan juga diharapkan dapat terus terjaga seiring dengan menguatnya konsumsi masyarakat. Investasi juga diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih terdapat kecenderungan *wait and see* dari pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil pemilu. Di sisi lain, kinerja ekspor diharapkan dapat terus menguat

di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan semakin membaik secara bertahap di tahun 2024. Selain itu hasil produk hilirisasi yang optimal juga akan mendukung peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Mulai beroperasinya beberapa smelter dan kawasan industri akan mendorong sektor pertambangan. Sektor pertanian akan semakin lebih baik dengan semakin besarnya dukungan Pemerintah dan meningkatnya permintaan produk pertanian untuk konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan. Sementara itu, penyelesaian proyek infrastruktur Pemerintah termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat memperkuat sektor konstruksi.





Laporan Utama

Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yaitu di kisaran 2,8 persen, yang dipengaruhi oleh risiko perlambatan ekonomi dunia, pergerakan harga komoditas global yang terus menurun meskipun masih fluktuatif, dan tren perekonomian domestik yang positif. Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga tingkat inflasi dalam batas aman dan terkendali. Di sisi pangan, inflasi komponen *volatile food*, terutama dampak dari faktor cuaca masih menjadi risiko utama. Inflasi *volatile food* adalah inflasi yang dipengaruhi oleh terjadinya suatu keadaan tertentu, seperti panen, gangguan alam, dan perkembangan harga komoditas pangan baik domestik maupun internasional. Gejolak harga pangan yang tiba-tiba dan ekstrem dapat berdampak langsung pada ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan, dan ketahanan pangan, utamanya bagi masyarakat menengah ke bawah. Jika harga komoditas pangan meningkat signifikan, maka porsi pengeluaran untuk makanan otomatis juga meningkat.

Kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan membuat aktivitas produksi, investasi, penyimpanan, dan perdagangan akan menjadi lebih kompleks karena ketidakpastian harga di masa depan. Atas hal tersebut Pemerintah senantiasa berusaha menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain melalui intervensi harga dan pasokan, penguatan produksi dan cadangan pangan, pengawasan dan peningkatan kelancaran distribusi, serta sinergi pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Nilai tukar Rupiah diproyeksikan sebesar Rp15.000 per dolar AS, yang dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian yang bersumber dari percepatan pengetatan kebijakan moneter di AS, dan melambatnya ekonomi dunia. Ketatnya likuiditas global yang dipicu oleh kebijakan

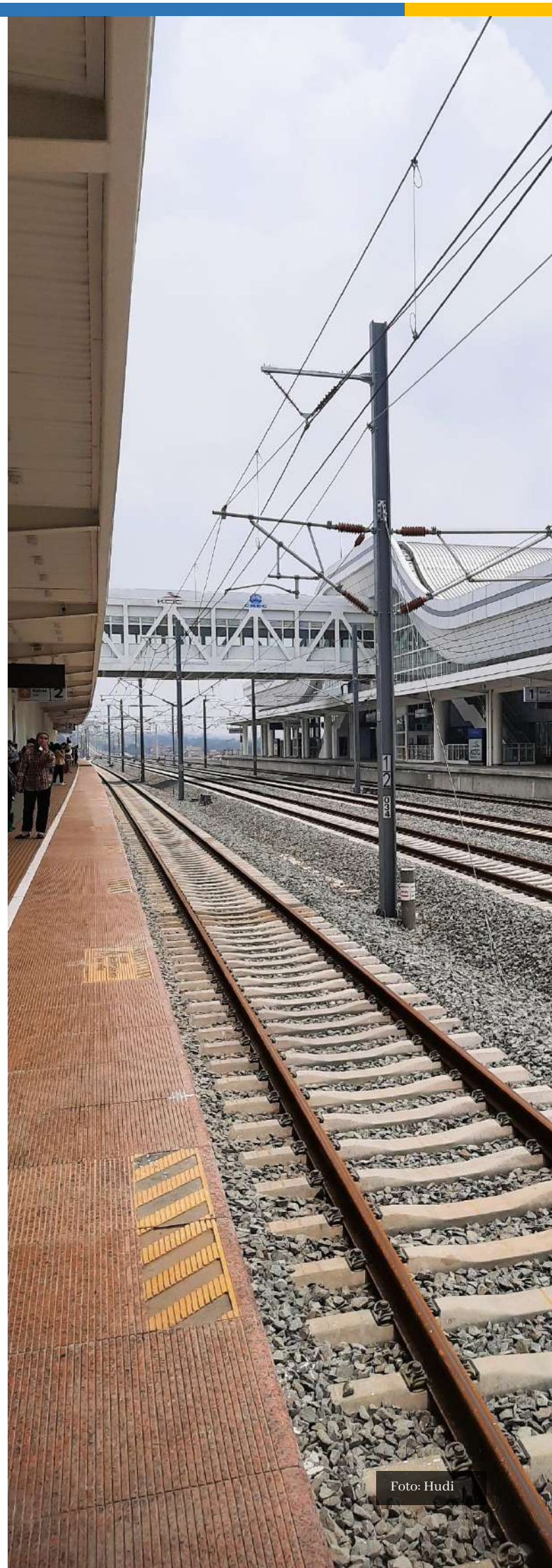


Foto: Hudi



moneter AS, berpotensi menimbulkan *capital flight* dan memberikan tekanan terhadap rupiah. Di sisi lain, berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia dan menguatnya neraca transaksi berjalan memberikan dampak positif pada penguatan nilai tukar rupiah. Untuk itu, diperlukan kebijakan perluasan *Local Currency Transaction* (LCT) dengan sejumlah mata uang asing, terutama yang menjadi mitra dagang strategis Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam mendukung penguatan ekonomi nasional. LCT sendiri adalah penyelesaian transaksi secara bilateral oleh pelaku usaha dengan menggunakan mata uang negara asalnya masing-masing.

Selanjutnya, tingkat suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan akan berada di level 6,7 persen di tahun 2024, yang dipengaruhi risiko tekanan *yield* sebagai dampak kebijakan pengetatan moneter terutama di AS yang berdampak pada ketatnya likuiditas global. Namun demikian, prospek pemulihan ekonomi nasional yang masih berlanjut, stabilitas makro ekonomi makro yang terjaga, serta komitmen pengelolaan fiskal yang *prudent* dan kredibel akan memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produk-produk SBN yang lebih kreatif, melalui pendalaman pasar dan perluasan basis investor untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Harga minyak ICP tahun 2024 diproyeksikan berada pada level US\$82 per barel. Fluktuasi harga yang terjadi di sepanjang tahun 2023 diperkirakan masih akan terus berlanjut di tahun 2024, terutama karena pengaruh tensi geopolitik. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kondisi perekonomian global, dan

respons kebijakan OPEC+ juga akan memengaruhi permintaan dan penawaran minyak mentah dunia. Mulai pesatnya pengembangan dan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga disinyalir bakal menekan angka permintaan minyak dalam jangka menengah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan postur APBN dan daya beli masyarakat, asumsi harga minyak mentah ditetapkan pada level yang realistis sesuai faktor-faktor tersebut di atas.

Lifting minyak bumi, diproyeksikan akan berada pada kisaran 635 ribu barel per hari (bph). Adapun, *lifting* gas bumi diproyeksikan sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari (bsmph), yang didasarkan pada pertimbangan kapasitas dan potensi produksi lapangan migas *existing*. Upaya peningkatan produksi dilakukan diantaranya melalui optimalisasi aset dan sumur produksi, terobosan kebijakan, kemudahan berusaha, insentif fiskal, serta eksplorasi masif di wilayah cekungan baru, untuk mendukung peningkatan *lifting* migas dalam jangka menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sasaran dan indikator tahun 2024 ditargetkan pada level yang lebih baik. Penurunan tingkat pengangguran dengan didukung berbagai program perlindungan sosial dari Pemerintah diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memperbaiki rasio gini, meningkatkan kualitas, dan daya saing SDM yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai IPM. Selain itu, keberpihakan pembangunan bagi nelayan dan petani juga terus ditingkatkan, tercermin dari nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTP) yang terus meningkat. Pemerintah dan DPR menyepakati sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024, sebagai berikut:



Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator	RAPBN 2024	Kesepakatan
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,5 – 7,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	5,0 – 5,7
3.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	na	0 - 1
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,374 – 0,377	0,374 – 0,377
5.	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	73,99 – 74,02
6.	Nilai Tukar Petani	105 – 108	105 – 108
7.	Nilai Tukar Nelayan	107 – 110	107 – 110

Sumber: Kementerian Keuangan

Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 tersebut, di antaranya, pertama, melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Pembangunan yang dilakukan diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru. Di sisi lain, peningkatan kualitas kerja juga penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan pasar tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja agar memperoleh pekerjaan yang layak.

Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dilakukan melalui langkah peningkatan kualitas program perlindungan sosial, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penguatan data penerima manfaat bantuan sosial. Ketiga, peningkatan NTP dan NTN melalui berbagai kebijakan yang afirmatif, antara lain melalui subsidi pupuk, subsidi benih, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung petani dan/atau nelayan sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan petani dan/atau nelayan.

Selain itu, diperlukan pula perluasan akses lahan untuk petani melalui percepatan program redistribusi lahan program reformasi agraria. Untuk nelayan, bantuan kapal kepada koperasi nelayan dan peningkatan investasi di bidang budidaya dan perikanan tangkap, merupakan hal yang cukup krusial dalam meningkatkan kapasitas dan produksi nelayan.

Akhir kata, suatu ketika Walt Disney pernah berkata, “Aku selalu melihat dari sisi optimis dari kehidupan, namun aku cukup realistis untuk mengetahui bahwa hidup itu kompleks.” Sebagaimana Walt Disney, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dirancang optimis namun tetap realistis (*achievable*) di tengah berbagai tantangan global yang dihadapi. Menurut Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute (SRI), angka pertumbuhan 5,2 persen tersebut merupakan angka yang cukup realistis, mengingat tahun 2024 juga bertepatan dengan tahun politik yang menandai awal mula proses transisi baru. Oleh karena itu, tiadalah hal yang pantas kita berikan, selain sepenuhnya mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan berbagai program Pemerintah dalam APBN sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara yakni melindungi, memajukan, mencerdaskan masyarakat, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.



APBN 2024: Percepat Pembangunan Melalui Transformasi Ekonomi

Ahmad Nawawi, Direktorat Penyusunan APBN

Foto: Aufa Naufal

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 diproyeksikan penuh dengan ketidakpastian. Guncangan global yang terjadi, baik yang berasal dari gejolak geopolitik, perubahan iklim (*climate change*), maupun disrupsi ekonomi digital dapat menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu memengaruhi kinerja perekonomian global.

Selain tantangan di atas, kondisi ekonomi global diperkirakan masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang tinggi, serta suku bunga acuan yang bertahan di level tinggi.

Namun, dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah tetap optimis bahwa kondisi ekonomi domestik tahun 2024 tetap tumbuh positif. Perkiraan pertumbuhan ini merupakan hasil dari keberlanjutan ekspansi ekonomi

nasional di tahun depan dan juga dampak pemulihan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi berturut-turut selama 7 kuartal terakhir tumbuh di atas 5%.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan keberlanjutan ekspansi ekonomi tahun depan, Pemerintah menetapkan indikator ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5,2%, inflasi 2,8%, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, nilai tukar Rp15.000/USD, harga minyak mentah USD80/barel, *lifting* minyak bumi 625 ribu barel per hari, dan *lifting* gas 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Sasaran pembangunan pada 2024 difokuskan pada akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan ditargetkan 6,5-7,5%, rasio gini 0,374-0,377,



tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7%, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, nilai tukar petani meningkat 105-108, dan nilai tukar nelayan 107-110.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, maka arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Sebuah tema yang sangat relevan, namun memiliki tantangan yang besar karena tahun 2024 merupakan tahun politik, dengan adanya pelaksanaan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga terdapat dinamika global yang harus terus kita perhatikan karena dapat berimplikasi terhadap APBN.

APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden, yaitu mencapai empat tujuan besar. Keempat tujuan besar tersebut yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

Desain kebijakan APBN 2024 untuk mencapai empat tujuan tersebut, yaitu penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi

Di bidang pembangunan infrastruktur, Pemerintah mengalokasikan Rp422,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi, ketenagalistrikan, dan pangan), infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, serta infrastruktur teknologi informasi dalam rangka digitalisasi.

dan institusi. Kebijakan tersebut mutlak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan demi percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Pemerintah terus melaksanakan pembangunan kualitas SDM, karena SDM berkualitas adalah modal yang sangat penting untuk pembangunan masa depan. Dukungan APBN 2024 untuk pendidikan mencapai Rp660,8 triliun (20% dari APBN). Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan memperkuat investasi di bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa dan dukungan riset.

Pemerintah terus mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Anggaran kesehatan pada APBN 2024 mencapai Rp186,4 triliun (5,6% dari APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk transformasi sistem kesehatan dan akselerasi penurunan *stunting*. Transformasi sistem kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi.

Pemerintah terus melakukan penguatan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan sepanjang hayat. Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2024 Rp493,5 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang untuk memotong rantai kemiskinan.

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat krusial. Pemerintah terus melakukan transformasi di bidang ketahanan pangan. Pada tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan Rp108,8 triliun untuk program ketahanan pangan. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.



Laporan Utama

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan nilai tambah SDA. Kebijakan tersebut guna meningkatkan investasi, penerimaan negara, ketersediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, serta efek *multiplier* lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dukungan Pemerintah terhadap kebijakan ini berupa pemberian insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.

Selanjutnya, dari sisi postur APBN 2024, dengan mempertimbangkan asumsi makro, berbagai kebijakan fiskal, serta mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan kebijakan transformasi ekonomi, maka pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.781,3 triliun. Sementara, belanja negara mencapai Rp3.304,1 triliun, dan keseimbangan primer diperkirakan negatif Rp25,5 triliun, di mana didorong menuju positif.

Guna mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, maka defisit APBN ditetapkan 2,29% terhadap PDB. Pembiayaan untuk mendanai defisit dilakukan dengan hati-hati, kreatif, inovatif, akuntabel, dan memperhatikan kesinambungan fiskal, serta tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman.

Selanjutnya, seluruh desain kebijakan APBN 2024 diharapkan dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.





Inovasi dan Diversifikasi PNBP Menjaga Keberlanjutan Sumber Pendapatan Negara

Sandy Permana, Direktorat PNBP K/L

Pemerintah saat ini gencar meningkatkan pembangunan nasional demi mencapai visi Indonesia 2045 yang menitikberatkan pada kedaulatan, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Capaian pembangunan yang telah tercapai hingga saat ini diharapkan akan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai visi tersebut. Untuk meraih tujuan tersebut, diperlukan percepatan dalam transformasi ekonomi guna mendukung pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Seiring dengan tema APBN tahun 2024 yang menekankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," Presiden Joko Widodo, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023, menekankan pentingnya APBN tahun 2024 merespons dinamika perekonomian, menjawab

tantangan pembangunan, serta menjaga kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kestabilan APBN dalam jangka menengah-panjang.

RAPBN 2024 mengusung pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, terdiri dari perpajakan (Rp2.307,9 triliun), PNBPN (Rp473,0 triliun), dan hibah (Rp0,4 triliun), dengan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun yang terbagi antara belanja pemerintah pusat (Rp2.446,5 triliun) dan transfer ke daerah (Rp857,6 triliun). Keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun bergerak menuju positif, sementara defisit anggaran mencapai 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun.

PENDAPATAN DALAM NEGERI, 2022 - 2024
(triliun rupiah)

Uraian	LKPP 2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
1. Penerimaan Perpajakan	2.034,6	2.118,3	2.307,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	595,6	515,8	473,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	268,8	223,3	197,8
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40,6	81,5	80,8
c. PNBPN Lainnya	196,3	131,5	111,0
d. Pendapatan BLU	89,9	79,5	83,4
Total Pendapatan Dalam Negeri (1+2)	2.630,1	2.634,1	2.780,9

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah

Kondisi PNBPN Saat Ini

Dalam RAPBN 2024, PNBPN tetap menjadi salah satu sumber pendapatan negara selain perpajakan dan hibah. Nota keuangan RAPBN 2024 mencatat PNBPN sebesar Rp473,0 triliun, berasal dari berbagai sumber seperti royalti, layanan pemerintah, hasil produksi, dividen, dan lainnya (Tabel 1). Sumber pendapatan ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dengan pungutan dari sumber daya alam (SDA) tetap menjadi penyumbang utama PNBPN, diikuti oleh PNBPN lainnya.

Kontribusi PNBPN terhadap APBN mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, PNBPN menyumbang 22,65% dari total pendapatan APBN sebesar Rp595,6 triliun, sedangkan pada tahun 2023 diproyeksikan turun menjadi 19,58% dari total pendapatan Rp515,8 triliun, dan pada RAPBN 2024 direncanakan turun lebih lanjut menjadi 17% dari total pendapatan Rp2.780,9 triliun. Penurunan ini menjadi perhatian karena menunjukkan

ketergantungan terhadap PNBPN yang semakin berkurang sebagai sumber pendapatan negara.

Penurunan kontribusi PNBPN terhadap APBN terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional, yang berdampak negatif pada pendapatan dari SDA. Hal ini mempengaruhi PNBPN secara keseluruhan karena SDA merupakan penopang utama PNBPN. Untuk mengatasi penurunan ini dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perlu diambil langkah-langkah inovatif dan diversifikasi dalam sumber pendapatan, khususnya yang berasal dari PNBPN. Ahli ekonomi seperti Paul Romer dan Joseph Stiglitz telah menekankan pentingnya inovasi dan diversifikasi sumber pendapatan dalam pembangunan ekonomi, mengingat risiko ketergantungan pada harga komoditas yang fluktuatif (Juhro, S. M., & Trisnanto, B. 2019; Irawan, N. C., 2023).

Upaya Inovasi PNBPN

Saat ini sudah ada aplikasi *automatic block system* (ABS) yang dikenakan pada minerba. Ke depan diharapkan bisa diterapkan pada sektor lain seperti pada denda administratif di bidang persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berikut langkah-langkah inovasi untuk pengelolaan PNBPN denda administratif tersebut pada KPPU dalam konteks ABS.

1. Ekspansi ke Sektor Lain: Identifikasi sektor lain yang memiliki potensi PNBPN yang belum sepenuhnya terpetakan seperti denda administratif di bidang persaingan usaha.

2. Implementasi ABS: Pastikan bahwa ABS diterapkan secara efektif untuk monitoring dan *collecting* denda administratif dengan akurat dan *real-time*.
3. Penggunaan Teknologi Digital: Manfaatkan teknologi digital untuk memudahkan *collecting*, *tracking*, dan pelaporan PNBPN dari denda administratif di bidang persaingan usaha. Platform digital dapat membantu dalam mengintegrasikan data dengan lebih efisien.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam *collecting* PNBPN, termasuk informasi terkait dengan denda administratif di bidang persaingan usaha. Pemerintah harus memastikan bahwa data ini tersedia untuk publik.
5. Sosialisasi Kampanye Kesadaran: Organisasi kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban mereka dalam membayar PNBPN, termasuk denda administratif di bidang persaingan usaha.
6. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: Jalin kerja sama yang erat dengan KPPU untuk memaksimalkan pengumpulan denda administratif di bidang persaingan usaha dan memastikan kepatuhan pelaku usaha.
7. Evaluasi dan Revisi Kebijakan: Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan PNBPN yang ada dan lakukan revisi jika diperlukan berdasarkan perubahan kondisi atau hukum yang berlaku.

Langkah-langkah di atas merupakan hasil dari analisis *pros-cons* sebagaimana tabel berikut di mana langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan PNBPN.



Pros-Cons Penerapan ABS pada Denda Administratif di Bidang Persaingan Usaha, KPPU

Aspek	Pro (Keuntungan)	Kontra (Kerugian)
Ekspansi ke Sektor Lain	Meningkatkan sumber pendapatan negara dari KPPU	Memerlukan pemetaan dan pengelolaan tambahan pada KPPU.
Implementasi ABS	Meningkatkan efisiensi dan akurasi <i>collecting</i> PNBPNBP	Potensi resistensi atau tantangan teknis dalam penerapan ABS
Penggunaan Teknologi Digital	Mempermudah pengumpulan, pelacakan, dan pelaporan PNBPNBP	Investasi awal dalam infrastruktur digital dan pelatihan diperlukan
Transparansi dan Akuntabilitas	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha	Memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas
Sosialisasi Kampanye Kesadaran	Meningkatkan kesadaran tentang kewajiban membayar PNBPNBP	Memerlukan sumber daya untuk mengorganisasi kampanye tersebut
Kolaborasi dengan Lembaga Terkait	Memungkinkan kerja sama yang erat dengan KPPU	Memerlukan koordinasi yang baik untuk mengintegrasikan data
Evaluasi dan Revisi Kebijakan	Memungkinkan penyesuaian kebijakan sesuai perubahan kondisi	Perubahan kebijakan dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha

Berdasarkan analisis di atas, berikut ini rekomendasi kebijakan untuk dilakukan, antara lain

1. optimasi penerapan ABS pada KPPU terkait denda administratif di bidang persaingan usaha,
2. lakukan monitoring yang efisien,
3. dukungan IT untuk pengembangan platform yang terintegrasi,
4. tingkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan
5. pemberian insentif kepada pelaku usaha yang taat membayar denda administratif di bidang persaingan usaha untuk mendorong kepatuhan.

Diversifikasi Sumber Pendapatan

Tujuan dilakukannya diversifikasi sumber pendapatan PNBPNBP adalah untuk membantu meningkatkan PNBPNBP dengan meminimalkan

risiko ketergantungan pada satu jenis sumber daya. Kebijakan ini dapat diterapkan contohnya di sektor SDA perikanan. Berikut langkah-langkah diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan PNBPNBP dari SDA perikanan.

1. Pengembangan Pasar Ekspor
2. Pengelolaan Berkelanjutan
3. Pengembangan Produk Turunan
4. Diversifikasi Jenis Sumber Daya
5. Kemitraan dengan Swasta
6. Pengawasan dan Pengendalian
7. Promosi Produk Lokal

Langkah-langkah di atas merupakan hasil dari analisis *pros-cons* sebagaimana tabel berikut. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan PNBPNBP melalui diversifikasi sumber pendapatan.

Pros-Cons Diversifikasi Sumber Pendapatan dari PNBP Royalti SDA Perikanan

Aspek	Pro (Keuntungan)	Kontra (Kerugian)
Pengembangan Pasar Ekspor	Meningkatkan potensi PNBP dari ekspor perikanan	Memerlukan upaya pemasaran dan komitmen sumber daya
Pengelolaan Berkelanjutan	Mendukung ketersediaan sumber daya perikanan jangka panjang	Memerlukan pengawasan dan penegakan yang ketat.
Pengembangan Produk Turunan	Meningkatkan nilai tambah produk perikanan	Memerlukan riset dan pengembangan yang berkesinambungan
Diversifikasi Jenis Sumber Daya	Mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber daya	Memerlukan investasi awal dalam diversifikasi
Kemitraan dengan Swasta	Mendukung investasi dan pengembangan perikanan	Memerlukan manajemen risiko dan kerjasama yang baik
Pengawasan dan Pengendalian	Meminimalkan risiko kebocoran pendapatan	Memerlukan sumber daya untuk pengawasan yang ketat
Promosi Produk Lokal	Meningkatkan minat konsumen terhadap produk lokal.	Memerlukan strategi promosi dan pembiayaan

Berdasarkan analisis di atas, berikut ini rekomendasi kebijakan atas diversifikasi sumber pendapatan:

1. Fokus pada pengembangan pasar ekspor dengan memperluas jangkauan produk perikanan yang diekspor dan meningkatkan promosi internasional.
2. Perkuat pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui peraturan yang ketat dan pemantauan aktif.
3. Dorong riset dan pengembangan produk turunan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah dan mendukung diversifikasi pendapatan.
4. Jalin kemitraan yang kuat dengan sektor swasta untuk mendukung investasi dalam perikanan yang berkelanjutan dan pengembangan produk perikanan bernilai tambah.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan PNBP melalui ABS pada KPPU terkait denda administratif persaingan usaha, didukung dengan pengembangan IT, dan memberikan insentif untuk mendorong kepatuhan. Dalam

upaya diversifikasi sumber pendapatan, langkah-langkah yang diusulkan bertujuan untuk memperluas pasar ekspor perikanan, memperkuat pengelolaan berkelanjutan, mendorong pengembangan produk turunan, dan berkolaborasi dengan sektor swasta. Semua ini bertujuan menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, inovasi PNBP dan diversifikasi sumber pendapatan adalah kunci untuk memitigasi risiko ketergantungan pada satu sumber daya atau sektor. Rekomendasi kebijakan ini memberikan landasan untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang cermat dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat meraih manfaat jangka panjang dari langkah-langkah inovatif ini dalam membangun masa depan yang lebih cerah.



APBN 2024 : Optimisme di Akhir Tahun Pemerintahan

Maryono Ahmad Rojak
Direktorat Abid. Polhukhankam dan BA BUN



Pada tanggal 16 Agustus 2023 Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan RUU tentang APBN TA 2024 beserta Nota Keuangannya kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang antara lain memuat strategi pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RAPBN 2024 menjadi anggaran tahun terakhir Presiden RI Joko Widodo dengan Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya telah dan terus bekerja sejak tahun pertama di tahun 2019 dalam mengawal janji presiden yang dituangkan dalam rencana pengeluaran jangka menengah dan menjadi instrumen yang sangat penting dalam menghadapi berbagai ketidakpastian yang melanda dunia termasuk di dalam negeri Indonesia.

Pada Nota Keuangan disampaikan bahwa kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan 2 (dua) strategi utama yaitu Strategi kebijakan jangka pendek yang difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi untuk mengoptimalkan proses transformasi ekonomi,

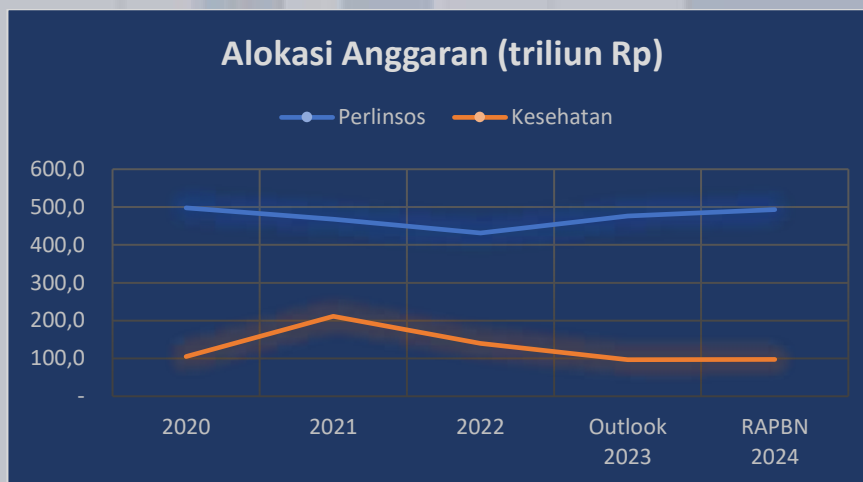
antara lain melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi *stunting*, pengendalian inflasi dan Mendorong peningkatan investasi. Selanjutnya, Strategi kebijakan jangka menengah-panjang difokuskan untuk mendukung antara lain penguatan kualitas SDM (*human capital*), percepatan pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal sangat berperan penting dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan serangkaian kebijakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Setiap tahunnya anggaran perlinsos dialokasikan lebih dari 400 triliun bahkan mencapai nyaris 500 triliun di Tahun 2024, yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat



berpenghasilan rendah. Jenis bantuan atau perlindungan sosial dalam APBN di antaranya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan dan perluasan program perlinsos pada saat terjadi pandemi COVID-19, antara lain tambahan nilai manfaat Program Sembako, Bantuan Beras Bulog, dan Diskon Listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli

masyarakat kelompok miskin dan rentan sebagai pemenuhan alokasi anggaran yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga mengalokasikan dana cukup besar dalam APBN mencapai sekitar 100 triliun setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan lebih dari 200 triliun sebagai upaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Perkembangan tren alokasi anggaran tersaji dalam Diagram 1 berikut:



Sumber : Buku Saku APBN DJA Kemenkeu dan Nota Keuangan 2024 (diolah)

Tren Alokasi Anggaran

Setelah lebih dari dua tahun seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19, *alhamdulillah* saat ini Indonesia telah mampu mengendalikannya, berkat kerja sama, kedisiplinan, sinergi, dan kegotongroyongan seluruh komponen bangsa. APBN berperan penting untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19, antara lain melalui vaksinasi serta mendukung dan melindungi dunia usaha terutama UMKM. Perang antara Rusia dan Ukraina juga telah membuat gejolak harga minyak dunia, yang membuat Pemerintah harus menaikkan anggaran kompensasi dalam APBN yang cukup besar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat agar harga

BBM tetap terjangkau. APBN juga mengalokasikan jenis bantuan untuk melindungi masyarakat kecil, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta bantuan pada sektor angkutan umum.

Meski situasi sudah terkendali, masih terdapat berbagai tantangan yang diperkirakan harus dihadapi oleh pemerintah, antara lain ketidakpastian perekonomian global akibat belum berakhirnya perang Rusia dengan Ukraina, ketegangan politik di antara negara-negara baik di Eropa maupun Asia serta keterbatasan ruang fiskal akibat belum optimalnya aktivitas perekonomian. Peran APBN

sebagai *shock absorber* perlu tetap dilaksanakan untuk meredam guncangan akibat dampak ketidakpastian global yang dioptimalkan dalam menjaga daya beli masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam berita publikasi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional hingga kuartal I 2023 terus menunjukkan pemerataan di seluruh wilayah, baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitasnya. Menkeu menjelaskan, selain pulau Jawa dengan penyumbang pertumbuhan terbesar yang mencapai 57,2 persen, juga ditopang oleh daerah-daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang juga oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor hilirisasi mineral dan sektor primer mendorong penguatan neraca berjalan. Konsistensi atas penguatan neraca transaksi berjalan membuat Indonesia mampu keluar dari kelompok lima negara yang memiliki

tingkat kerentanan pada fundamental ekonomi (*fragile fire*). Tantangan di dalam negeri lainnya yang perlu diwaspadai adalah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketersediaan anggaran pembangunan IKN dan stabilitas politik nasional saat pelaksanaan Pemilu perlu menjadi perhatian tahun depan.

Namun demikian, di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income*) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu kunci keberhasilan atas kinerja tersebut adalah pelaksanaan strategi fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent*. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global negara-negara utama tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Negara-Negara Utama %

Negara	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
Global	2,2	-3,1	6,3	3,5	3,0	3,0
Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,9	1,5
AS	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,8	1,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,5
India	3,9	-5,8	9,1	7,2	6,1	6,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	3,8	5,5	4,6	4,5
- Indonesia	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0	5,0
- Malaysia	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5	4,5
- Filipina	6,1	-6,1	5,7	7,6	6,2	5,5
- Thailand	2,1	-6,1	1,5	2,6	3,4	3,6
- Singapura	1,3	-3,9	8,9	3,7	1,5	2,1

Sumber : *International Monetary Fund* pada Nota Keuangan RAPBN 2024



Pemerintah telah secara resmi mencabut status pandemi di Indonesia pada 21 Juni 2023, yang berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik karena aktivitas perekonomian kembali berjalan seperti keadaan semula yaitu sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Pemulihan perekonomian Indonesia terlihat semakin menguat dan berkualitas pada tahun 2023, konsolidasi fiskal yang tercapai melalui penurunan defisit anggaran secara bertahap hingga tahun 2023, menimbulkan optimisme terhadap kondisi APBN 2024. Guncangan akibat pandemi COVID-19 yang telah berlalu diharapkan menjadi pembelajaran yang sangat mahal dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa datang. Optimisme terhadap kondisi perekonomian yang tercermin dalam RAPBN 2024 memberikan semangat tersendiri bagi seluruh masyarakat, meskipun terdapat beberapa tantangan yang menuntut kewaspadaan pemerintah.

Saat ini Indonesia telah sukses melewati masa pandemi COVID-19, dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat, serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent*, perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh di atas 5 persen. Strategi kebijakan fiskal seperti *Automatic Adjustment* yang dilakukan dengan memblokir anggaran kementerian/lembaga yang tidak prioritas sebesar 5 persen, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 tetap dijalankan pemerintah di tahun 2024, karena sudah terbukti dapat meredam gejolak fiskal akibat ketidakpastian global dan geopolitik. Pemblokiran anggaran *Automatic Adjustment* tidak mempengaruhi kinerja kementerian/lembaga karena diambil dari kegiatan yang tidak prioritas sehingga target-target prioritas pembangunan tetap dapat tercapai.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 selain sebagai tantangan yang harus dihadapi juga berpotensi menjadi penggerak perekonomian di berbagai daerah sehingga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi baik pemerintah maupun rumah tangga. Stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga, hal tersebut diharapkan dapat mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong konsumsi di tahun 2024 sehingga diharapkan akan berdampak secara signifikan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dukungan anggaran yang memadai tidaklah berlebihan jika kinerja APBN di Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju akan dapat mengatasi berbagai tantangan yang akan timbul ke depannya dan memperkuat fondasi dalam rangka mengoptimalkan proses transformasi ekonomi, yaitu dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi *stunting* mencapai 14 persen, pengendalian inflasi, dan mendorong peningkatan investasi. Kebijakan fiskal yang telah didesain, diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan secara tepat dan mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal.

DIGITALISASI PENGESAHAN DIPA



SAKTI Modul Penganggaran



Pagu Indikatif

Pagu Anggaran

Pagu Alokasi Anggaran

Penetapan DIPA

SEBELUM

(Kondisi saat ini)



SESUDAH

(Secara Elektronik)



Pagu Pelaksanaan Anggaran K/L

DIPA Kementerian/
Lembaga

SAKTI Modul Pembayaran



STRATEGI KEBIJAKAN OPTIMALISASI PNBP K/L DALAM MENATAP APBN TA 2024

Latif Sholichin,
Direktorat PNBP K/L

Mengutip Nota Keuangan RAPBN TA 2024, optimalisasi PNBP K/L pada tahun 2024 masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan dalam rangka pencapaian target dan optimalisasi PNBP K/L, antara lain (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (3) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP; (4) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (5) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; serta (6) perluasan pemanfaatan sistem informasi.

PNBP K/L ini dalam APBN merupakan pendapatan negara sebagai bagian PNBP lainnya selain Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan *Domestic Market Obligation* (DMO). Dalam perkembangan penerimaan PNBP K/L tahun 2024, terdapat 4 K/L yang mampu memberikan kontribusi terbesar dengan proporsi 60,5% dari total PNBP K/L, meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2024, disebutkan keempat K/L ditargetkan mengalami kenaikan dari *outlook* tahun 2023. Kemenkominfo meningkat sebesar Rp0,9 triliun atau 4,4% dari *outlook* 2023, Polri meningkat sebesar Rp0,2 triliun atau 2,0% dari *outlook* 2023, Kemenhub meningkat sebesar Rp1,3 triliun atau 20,6% dari *outlook* 2023, dan Kemenkumham meningkat sebesar Rp1,8 triliun atau 30,0% dari *outlook* 2023. Perkembangan realisasi PNBP K/L tahun 2019-2022, *outlook* tahun 2023 dan proyeksi PNBP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perkembangan PNBP Pada 4 K/L, 2019-2024
(triliun rupiah)

No	K/L	2019	2020	2021	2022	<i>Outlook</i> 2023	RAPBN 2024
1	Kemenkominfo	19,0	22,1	21,7	23,2	20,6	21,5
2	Polri	9,4	7,7	8,8	9,4	9,9	10,1
3	Kemenhub	7,8	6,5	6,7	7,3	6,3	7,6
4	Kemenkumham	4,4	2,9	3,2	6,5	6,0	7,8

Sumber: Kemenkeu

Menilik strategi kebijakan optimalisasi PNBP pada K/L dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu, tahun 2022 dan 2023, secara prinsip keenam strategi kebijakan pada tahun 2024 ini relatif sama dengan strategi kebijakan optimalisasi PNBP K/L tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan kebijakan tahun 2023 masih relatif sama namun untuk tahun 2023 terdapat penambahan 2 (dua) kebijakan berupa mengatur kembali tata cara penggunaan PNBP untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah pada masa yang penuh

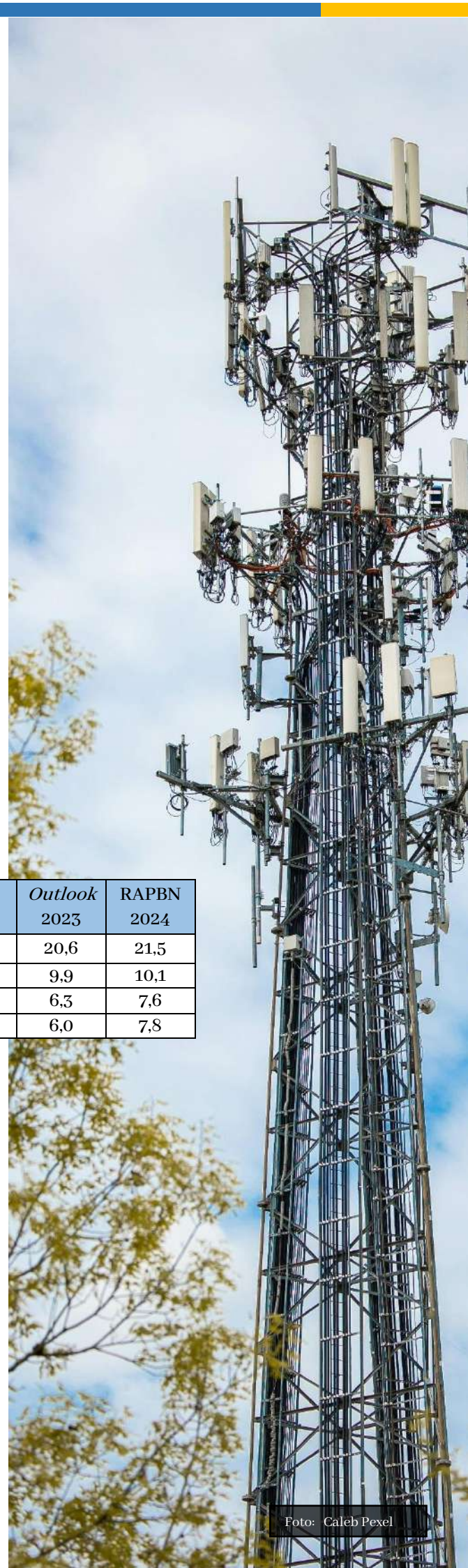




Foto: Mesalla Pexel

ketidakpastian, dan pemanfaatan penerimaan PNBP yang melebihi target diatur oleh Bendahara Umum Negara sebagai bentuk *good governance* sesuai arahan BPK. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui strategi kebijakan optimalisasi PNBP K/L tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kebijakan pertama, peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan antara lain adanya penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam proses pelaksanaan layanan perizinan pada Kemenkominfo atau lebih dikenal dengan penyelenggaraan digitalisasi perizinan. Penyelenggaraan digitalisasi perizinan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika. Pada laman Kemenkominfo disebutkan terdapat 6 layanan perizinan yang berbasis OSS, meliputi Perizinan Penyelenggaraan Pos; Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi, Telekomunikasi Khusus, dan Penomoran Telekomunikasi; Penyelenggaraan Penyiaran TV dan Penyiaran Radio; Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Hak Labuh Satelit; Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; serta Pendaftaran Sistem Elektronik. Sekalipun penerapannya sudah dilakukan sejak 2018, melalui pengembangan kebijakan penyelenggaraan digitalisasi perizinan diharapkan mampu mencapai target Rp25,58 triliun pada tahun 2024 seperti dikatakan Menteri Kominfo sebagaimana laman Kemenkominfo melalui siaran pers 13 September 2023.

Kebijakan kedua, optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif ini antara lain dilakukan oleh Kemenhub dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP BMN, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN. Mengingat penerimaan PNBP dari pengelolaan aset BMN ini masih relatif rendah, sehingga diperlukan adanya strategi yang ekstra dalam melakukan optimalisasinya agar aset BMN yang dimiliki menjadi lebih produktif.

Kebijakan ketiga, penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP. Terkait kebijakan ini telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan



PNBP sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 58 tahun 2023 bahwa K/L diharapkan mampu melakukan *monitoring* pengelolaan PNBP dan juga melakukan pengawasan PNBP melalui APIP K/L. Melalui monitoring dan pengawasan PNBP ini, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan tata kelola PNBP dan peningkatan penggalian potensi PNBP yang dapat berimbas pada peningkatan atau optimalisasi PNBP pada K/L yang bersangkutan.

Kebijakan keempat, penyesuaian jenis dan tarif PNBP K/L ini dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP. Ekstensifikasi antara lain dilakukan melalui inventarisasi potensi jenis PNBP yang selanjutnya akan diatur dalam PP atau PMK terkait, dan intensifikasi antara lain dapat dilakukan melalui evaluasi atau reviu besaran tarif atas jenis/layanan PNBP pada K/L yang bersangkutan. Namun demikian, dalam penambahan/perubahan jenis dan tarif PNBP ini tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah berkaitan dengan penyediaan jenis PNBP bersangkutan, dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha dan sosial budaya; serta aspek keadilan sesuai dengan masing-masing objek PNBP. Selain itu juga, dibuka peluang bagi K/L untuk menetapkan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal tertentu yang bertujuan agar kebijakan penetapan tarif atas jenis PNBP oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat.

Kebijakan kelima, peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait ini antara lain dilakukan pada Kemenkominfo melalui penataan ulang (*refarming*) frekuensi spektrum frekuensi radio 2,3 GHz. Dalam laman Kemenkominfo disebutkan penataan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi melalui optimalisasi penggunaan

spektrum frekuensi radio yang berdampak pada perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Dalam *refarming* ini dilakukan dengan sinergi terhadap kedua penyelenggara jaringan bergerak seluler (PT Smart Telecom dan PT Telekomunikasi Selular) sebagai pemegang IPFR pada pita frekuensi radio 2,3 GHz. Selain itu, Polri juga melakukan kerja sama/sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di seluruh Indonesia guna peningkatan optimalisasi PNBP.

Kebijakan keenam, perluasan pemanfaatan sistem informasi ini antara lain dilakukan pada Kemenkominfo melalui peningkatan penggunaan TIK melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBP memanfaatkan e-PNBP serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah. Selain itu, Kemenkumham juga memanfaatkan pengembangan sistem informasi melalui optimalisasi layanan paspor (*easy passport*, paspor Simpatik, dan kebijakan paspor masa berlaku hingga 10 tahun), layanan e-visa, penerapan Golden Visa, intensifikasi PNBP layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta melanjutkan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan Intelektual (POP KI), *Mobile IP Clinic*, *Program Intellectual Property (IP) Marketplace*, dan *Patent examiner Goes to Campus*.

Melalui keenam strategi kebijakan optimalisasi PNBP K/L di atas, diharapkan mampu turut serta dalam menopang APBN TA 2024 dari sisi pendapatan negara di tengah gejolak komoditas, tren digital, dan keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi sehingga sesuai tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.



Asa Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Penghujung 2024

Foto: Canva

Lisno Setiawan,
Direktorat Penyusunan APBN

Di akhir periode kabinet Indonesia Maju, pemerintah sangat berkomitmen dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Hal ini terlihat dari masuknya tingkat kemiskinan ekstrem dalam sasaran dan indikator Pembangunan 2024 sebagaimana hasil pembahasan RAPBN 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0-1 persen. Target tersebut sebangun dengan target pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Secara definisi, kemiskinan ekstrem digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sebagai "kondisi penduduk yang memiliki kekurangan sangat parah terhadap kebutuhan dasar manusia, antara lain makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dari

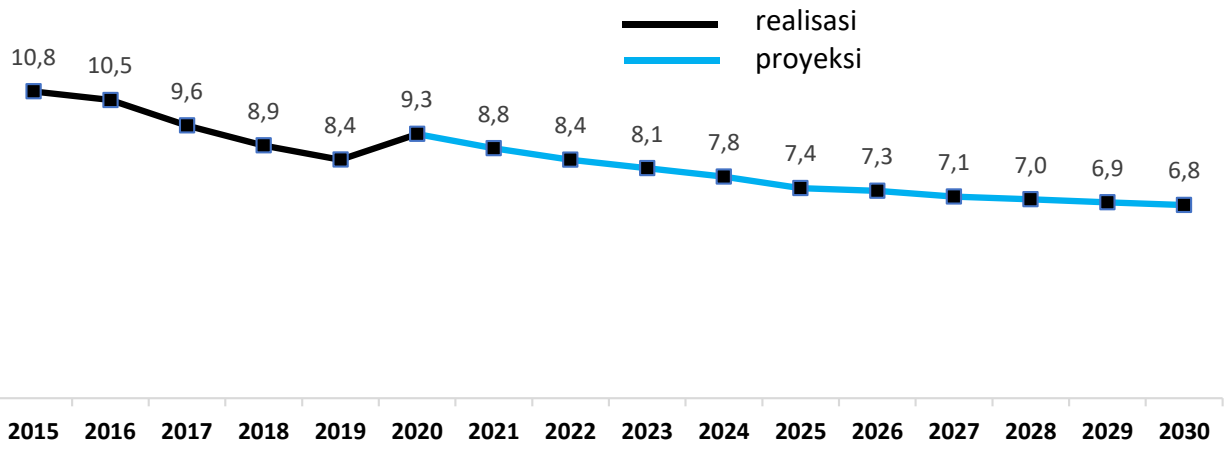
sisi pendapatan tetapi juga pada akses layanan dasar." Menurut Bank Dunia (2022), penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan.

Upaya ambisius dicantumkan dalam (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goal* (SDG) pertama yakni memberantas kemiskinan global pada tahun 2030. Berdasarkan target Bank Dunia, diperkirakan kemiskinan ekstrem akan dapat ditekan mencapai 3 persen di tahun 2030. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi, termasuk kebijakan dan inisiatif

yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini merupakan komitmen global untuk mengurangi disparitas kemiskinan di antara negara-negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Secara global, kemiskinan ekstrem pada tahun 2019 mencapai 8,4 persen dari total penduduk dunia. Namun, kondisi tersebut meningkat dampak pandemi COVID-19, sehingga diperkirakan mencapai 9,3 persen dari total penduduk dunia di tahun 2020. Arus pemulihan ekonomi dunia kembali menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang diperkirakan sudah kembali ke level prapandemi di tahun 2022 yakni 8,4 persen. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia *ter-update* (November 2022), maka target global sebesar 3 persen pada tahun 2030 diperkirakan tidak akan tercapai.

Perkembangan dan Proyeksi Kemiskinan Ekstrem Global (%)



Dalam upaya mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, Indonesia tergolong menjadi negara terdepan. Pemerintah Indonesia telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu (1) Pengurangan beban

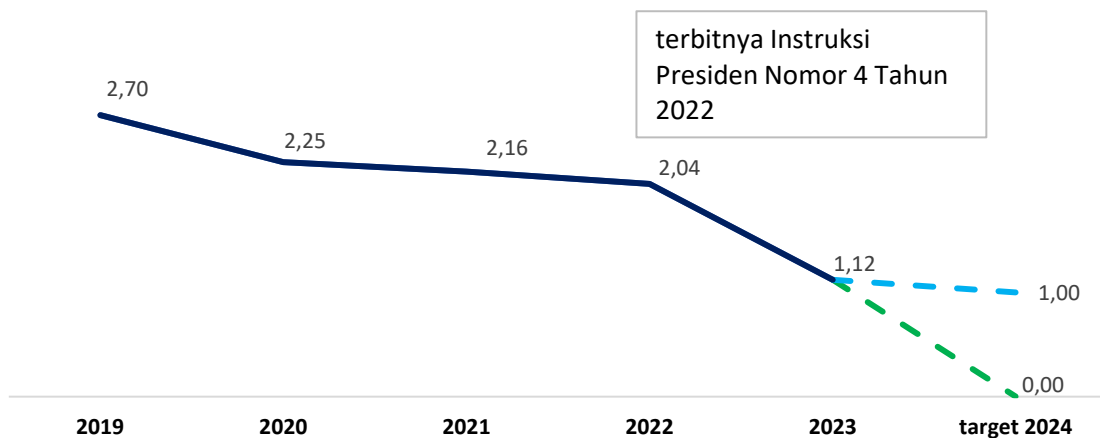
pengeluaran masyarakat yang diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran program perlinsos terutama pada desil 1, penguatan PKH dan Sembako, serta optimalisasi BLT; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat, diupayakan melalui tambahan proyek padat karya tunai K/L dan

optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD); (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.

Berbagai upaya penurunan kemiskinan ekstrem terus dilakukan. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 1,12 persen (BPS, Maret 2023). Berbagai upaya tersebut terus dieskalasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, upaya percontohan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dijalankan dengan melibatkan 35 daerah Kabupaten/Kota yang

diutamakan di 7 provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Setelah itu, program penanggulangan kemiskinan ekstrem diperluas hingga mencakup 212 wilayah pada tahun 2022, dan akan melibatkan 514 kabupaten/kota pada tahun 2023. Selanjutnya, eskalasi upaya penurunan kemiskinan ekstrem juga dilakukan mengacu data dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari sisi fiskal, dukungan pun terlihat dari anggaran perlindungan sosial yang sejak pandemi berada di atas Rp400 triliun lebih dan diperkirakan mengalami peningkatan di tahun 2024. Dengan upaya yang konsisten dan sinergitas yang baik antar-*stakeholder*, target penurunan kemiskinan ekstrem di penghujung tahun 2024 diharapkan akan dapat dicapai.

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA (%)



terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022

Sumber: BPS, TNP2K, dan Kesepakatan Pembahasan RAPBN





Melihat Kembali NTP sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

Faslan Syam Sajiah, Direktorat Abid. Ekontim

Kemiskinan masih menjadi isu utama kesejahteraan yang dihadapi oleh rumah tangga petani di Indonesia. Pada 2021, 51,33% rumah tangga miskin Indonesia bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya. Rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah dengan rata-rata pendapatan Rp1.931.833 per bulan (BPS, 2021).



Angka tersebut tentunya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata penghasilan pekerja di sektor industri, Rp2.876.185, dengan serapan angkatan kerja 13,6%, ataupun pekerja di sektor perdagangan dengan upah Rp2.433.665 dan serapan tenaga kerjanya 19,2% (BPS, 2021). Rendahnya produktivitas di sektor ini antara lain disebabkan minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan bahwa 73,1% rumah tangga pertanian pedesaan adalah petani kecil dan 60,30% berada dalam kemiskinan. FAO mendefinisikan petani kecil sebagai rumah tangga yang mengelola lahan pertanian paling luas sebesar ambang batas median tertimbang lahan pertanian di tingkat nasional. Di Indonesia, median ukuran lahan tertimbang adalah dua hektar, yang berarti semua lahan pertanian yang luasnya sama dengan atau di bawah dua hektar dianggap sebagai lahan pertanian kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa jumlah lahan pertanian sangat kecil (petani gurem) pada tahun 2018 meningkat hampir 11% dibandingkan tahun 2013. Lahan yang lebih kecil ini kurang mampu mencapai produktivitas yang lebih tinggi melalui skala ekonomi. Ketika pertanian berukuran sangat kecil menjadi lebih umum, pertanian menjadi lebih terkait dengan kebutuhan subsisten dan petani merasa lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan.

NTP sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

Mulai APBN TA 2021, Pemerintah resmi menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Bersama-sama dengan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan rasio gini, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan menjadi indikator dan target

pembangunan dalam APBN. NTP pada dasarnya adalah sebuah indeks yang menghubungkan antara pendapatan yang diterima oleh rumah tangga petani, melalui aktivitas usaha tani (produksi komoditas pertanian) dan pengeluaran petani untuk membeli barang dan jasa yang mencakup input produksi usaha tani untuk memproduksi komoditas pertanian dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Secara konseptual, NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Kedua indeks harga dihitung menggunakan formula *Modified Laspeyres Index*. Indeks Laspeyres adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai faktor penimbangannya. NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. I_t mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen di tingkat petani dengan dasar suatu periode tertentu. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani dan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Semakin tinggi nilai I_t , semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan petani, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima petani makin rendah.

Sementara itu, I_b disusun berdasarkan pengeluaran petani untuk menghasilkan



produksi pertanian termasuk di dalamnya konsumsi rumah tangga. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib ini juga dapat menggambarkan inflasi perdesaan. Data NTP dirilis oleh BPS secara periodik tiap bulan, lengkap dengan data NTP setiap provinsi ataupun NTP berdasarkan subsektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Nilai NTP dapat diinterpretasikan dengan cepat dan mudah. Jika nilai NTP lebih besar dari 100, ini dapat diartikan bahwa petani mengalami surplus atau dengan kata lain pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani saat ini lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Jika nilai NTP sama dengan 100, ini berarti petani mengalami *impas/break even* atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jika nilai NTP lebih kecil dari 100, itu berarti petani mengalami defisit atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan NTP Formula NTP yang sangat didominasi oleh faktor harga menjadikan rantai pasok krusial. Pemangkasan rantai pasok dari petani produsen ke konsumen diyakini dapat meningkatkan harga produk pertanian di tingkat petani dan menurunkan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Kementerian Pertanian melakukan berbagai upaya untuk memangkas rantai pasok tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, antara lain dengan memberikan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan (*harvester, dryer, RMU, dll*),

membangun jalan usaha tani, dan menguatkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dalam format korporasi petani.

Di sisi barang konsumsi petani, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, khususnya benih dan pupuk, secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta input produksi lain seperti pestisida, alsintan prapanen, dan irigasi. Bantuan input produksi kemudian didukung pula dengan penyuluhan pertanian agar petani dapat melaksanakan proses produksi sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) sehingga hasil produksi pertanian tetap optimal.

Selain memberikan bantuan sarana produksi secara langsung, pemerintah juga menjamin akses permodalan bagi Petani guna pembiayaan sarana produksi. Program Asuransi Usaha Tani Padi yang telah dilaksanakan memberikan jaminan bagi petani atas risiko ketidakpastian karena kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit/Organisme Pengganggu Tumbuhan. Untuk Petani yang memiliki *track record* usaha yang layak, pemerintah juga mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian, yaitu skema pembiayaan/kredit tanpa adanya agunan bagi para petani. Petani dapat pula memanfaatkan Resi Gudang yang diterima ketika menyimpan hasil panennya di suatu gudang, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk dijadikan agunan sebagai akses pembiayaan. Dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, petani pada umumnya dapat memperoleh pinjaman hingga 70 persen dari nilai resi gudang. Pemerintah juga menawarkan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) yang memberikan bunga rendah kepada petani.

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI AGUSTUS 2023



Gambar 1 Infografis Perkembangan NTP, Agustus 2023 (BPS)

Kritik terhadap NTP

Pada pasar komoditas pertanian yang kompetitif, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena kekurangan pasokan dibanding permintaan. Penurunan pasokan dapat terjadi karena penurunan produksi atau permintaan naik lebih tinggi dibandingkan penawaran (produksi). NTP dapat meningkat ketika harga produk pertanian meningkat di tengah terbatasnya pasokan, yang mungkin tidak mencerminkan peningkatan

pendapatan petani. Petani yang umumnya merupakan petani gurem hanya memperoleh pendapatan tambahan yang terbatas dari kenaikan harga per unit komoditas pertanian ketika mereka mengelola lahan kecil.

Alat ukur kesejahteraan yang dinilai paling ideal adalah indikator tingkat pendapatan. Konsep penghitungan NTP yang selama ini dilakukan tidak berkaitan dengan menghitung pendapatan rumah tangga petani. Penggunaan indeks



Laspeyres yang menggunakan asumsi kuantitas yang tetap, sehingga pengukuran It dan Ib tidak mencerminkan penerimaan dan pengeluaran riil petani. Pendapatan usaha tani akan meningkat apabila harga produksi naik dan atau tingkat produksi meningkat. Penggunaan asumsi kuantitas tetap pada indeks Laspeyres tidak memperhitungkan peningkatan produktivitas dan kemajuan pembangunan secara umum. Selain itu, konsep NTP hanya mengukur daya beli dari usaha budidaya komoditas tunggal, sementara sumber pendapatan petani beragam, baik *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*.

Alternatif Perhitungan lain

Pemerintah telah mengalokasikan belanja untuk mendukung ketahanan pangan dalam jumlah yang tidak sedikit. Program bantuan sosial juga diterima oleh rumah tangga petani. Secara fiskal, akumulasi belanja tersebut seharusnya dapat meningkatkan daya beli petani dan dikuantifikasi dalam penghitungan NTP. Pemerintah melalui BPS tengah mengkaji metodologi penghitungan NTP sehingga dapat dijadikan cerminan dampak kebijakan Pemerintah di sektor pertanian. Penyempurnaan penghitungan NTP dilakukan dengan mencoba menggunakan metode Rothwell dengan memasukkan faktor volume produksi.

Pemerintah juga menyadari kebutuhan akan indikator baru selain NTP untuk mengukur

kesejahteraan petani. Dalam Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) yang tengah disusun, BPS menggunakan konsep Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index*). Penggunaan konsep Kemiskinan Multidimensi diharapkan dapat memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistik. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu dimensi saja seperti tingkat konsumsi atau pendapatan, tetapi dilihat dari berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, pekerjaan, bahkan budaya.

Pembangunan pertanian berkelanjutan mengharuskan kita mendefinisikan kembali indikator-indikator inti kinerja sistem pertanian sambil mengembangkan dan menerapkan strategi pengukuran yang tepat untuk menghasilkan data yang diperlukan. Langkah pemerintah untuk berinvestasi pada data dan pemantauan baru yang spesifik diharapkan dapat menutup kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas data. Kondisi ini akan memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara akurat melacak kemajuan dan kinerja pembangunan pertanian, mengevaluasi dampak, serta memastikan akuntabilitasnya.





Optimalisasi PNBK Kemenlu dalam mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di APBN 2024

Sri Nurhayati,
Direktorat PNBK K/L

Sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN TA 2024 beserta Nota Keuangannya, menegaskan bahwa arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan, serta kesejahteraan secara optimal.

Selanjutnya, APBN juga harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. Dengan demikian, APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus





di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk melaksanakan belanja negara dalam APBN adalah pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP mempunyai peran yang cukup besar dalam APBN dari tahun ke tahun. PNBP sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemerintah, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan pajak dan dikelola dalam mekanisme APBN. Sebagai fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP memiliki peranan penting dan strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional.

Di samping itu, PNBP juga memiliki kontribusi besar dalam menunjang APBN, yaitu melalui optimalisasi penerimaan negara (fungsi penganggaran/*budgetary*). Merujuk pada RPJMN 2020-2024, optimalisasi PNBP ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP, serta pengembangan PNBP-*earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Salah satu penerimaan PNBP yang cukup kontributif berasal dari bagian anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenlu menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, memberikan perlindungan Warga

Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta meningkatkan infrastruktur diplomasi Kemenlu dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Mengacu UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pendapatan PNBP Kemenlu didasarkan atas layanan dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana salah satu fokus utama Kemenlu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik baik melalui upaya memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional maupun perlindungan bagi WNI atau BHI di dalam dan di luar negeri.

Peran Kemenlu dalam memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan PNBP, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, hasil pemungutan PNBP atas layanan tersebut, disetor ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan PNBP.

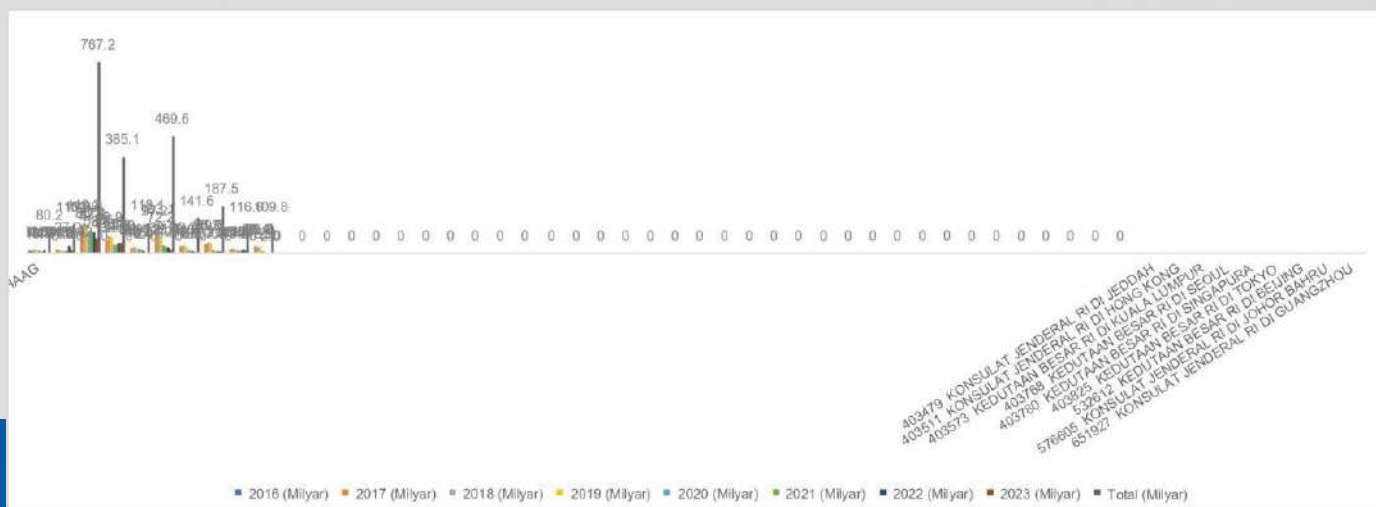
Dalam RAPBN Tahun 2024, pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun di antaranya penerimaan PNBP sebesar Rp473 triliun. Secara nominal, penerimaan PNBP tahun 2023 saat ini diharapkan terus mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jika dilihat dari perkembangan realisasi PNBP dan BLU tahun 2023, pemerintah yakin dapat menjaga tren capaian pendapatan negara agar tumbuh baik,



khususnya dalam peningkatan PNBП ke depannya sesuai target PNBП tahun 2024.

Berdasarkan data yang diolah pada 86 Bagian anggaran K/L penghasil PNBП dan BLU (aplikasi *Business Intelligence* DJA periode triwulan III Tahun 2023), terdapat kontribusi Kemenlu berada pada urutan ke-23 dengan realisasi PNBП sekitar Rp321,5 Milyar. Jika diakumulasikan

realisasi PNBП tahun 2016 s.d. 2023, dari 145 satker penghasil PNBП Kemenlu terdapat 10 (sepuluh) satker yang memiliki kontribusi PNBП terbesar yaitu Kedubes RI di Den Haag, Konjen RI di Jeddah, Konjen RI di Hongkong, Kedubes RI di Kuala Lumpur, Kedubes RI di Seoul, Kedubes RI di Singapura, Kedubes RI di Tokyo, Kedubes RI di Beijing, Konjen RI di Johor Bahru, dan Konjen RI di Guangzhou sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut di atas, satker penghasil PNBП tertinggi sekitar Rp767,2 Milyar dicapai oleh Konjen RI di Hongkong di mana sebagian besar berasal dari pendapatan dokumen kekonsuleran, dilanjutkan kedua tertinggi sekitar Rp469,6 Milyar dicapai oleh Kedubes RI di Singapura di mana sebagian besar berasal dari pendapatan Visa Republik Indonesia di luar negeri, dan dilanjutkan ketiga tertinggi sekitar Rp385,1 Milyar dicapai oleh Kedubes RI di Kuala Lumpur di mana sebagian besar berasal dari pendapatan Paspор Republik Indonesia di luar negeri.

Salah satu tantangan Kemenlu mengoptimalkan pendapatan PNBП, di antaranya ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing). Konvensi tersebut mengatur penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing guna mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan ratifikasi konvensi tersebut antara lain diharapkan dapat meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EoDB), mendorong investasi/modal dari luar negeri, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan “*bureaucratic red tape*”, dan menyederhanakan proses birokrasi.

Dampak pelaksanaan Perpres tersebut tidak hanya terjadi pada perubahan proses bisnis



legalisasi konvensional menjadi Apostille, tetapi juga adanya potensi penurunan PNBPN yang diterima oleh Kemenlu maupun Perwakilan RI. Penurunan PNBPN tersebut berasal dari layanan legalisasi dokumen dari dan ke-88 negara anggota dan 67 negara pihak (nonanggota) yang telah meratifikasi Konvensi Apostille. Namun demikian, dampak positif lain menjadi penambahan PNBPN baru pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Biaya Legalisasi Apostille per dokumen (sebagaimana ditetapkannya PMK Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Berkaitan hal tersebut, Kemenlu mengambil langkah penyesuaian jenis dan tarif PNBPN melalui penyusunan perubahan PP Nomor 49 Tahun 2016 sesuai ketentuan PMK Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN. Yaitu mengingat PP dimaksud belum mengatur ketentuan pembebasan tarif maupun pengenaan tarif secara resiprositas beserta ketentuan pemberhentian pemungutan tarif legalisasi. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan yang lebih responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel dalam rangka memperkuat sistem kelembagaan perlindungan WNI dan pelayanan publik.

Dalam situasi tersebut, Kemenlu berupaya mensinergikan untuk mengoptimalkan PNBPN melalui peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Mengefektifkan penatausahaan PNBPN dengan berpedoman pada standar akuntansi

pemerintahan dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBPN. Adapun mekanisme penatausahaan yang berlaku adalah mekanisme dalam rangka pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atau sistem yang terintegrasi dengan SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, termasuk sistem penatausahaan PNBPN yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat satker sampai dengan tingkat K/L sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan evaluasi/perbaikan secara kontinu dalam hal pengaturan jenis dan tarif layanan PNBPN melalui usulan perubahan jenis dan tarif PNBPN sebagaimana amanat PP 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas jenis PNBPN bahwa "Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Menteri selaku pengelola fiskal melakukan evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan". Hal tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan UU 9 Tahun 2018 tentang PNBPN bahwa "Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam pengelolaan PNBPN berwenang mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN".
3. Mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan melalui pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBPN. Namun demikian, diperlukan dukungan dana pemeliharaan yang cukup besar untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi guna terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mengedepankan aspek keamanan dan kemudahan bagi pengguna layanan.



4. Melakukan inventarisasi potensi jenis dan tarif PNBP untuk meningkatkan realisasi PNBP, salah satunya melalui penyesuaian tarif sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan:
 1. dampak penerapan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
 2. biaya penyelenggaraan layanan;
 3. aspek keadilan; dan/atau
 4. kebijakan pemerintah.
5. Konsistensi dalam rangka kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan PNBP secara efektif dengan menggunakan Aplikasi *Single Source Database* PNBP yang dapat diakses melalui tautan <https://ssdpnbp.kemenkeu.go.id>. Laporan pelaksanaan PNBP tersebut disampaikan berupa Laporan Semesteran (terdiri dari Laporan Realisasi PNBP, Laporan

Penggunaan Dana PNBP, Laporan Piutang PNBP, Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP, dan Informasi/Laporan Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP) dan Laporan Bulanan untuk keperluan pengelolaan/manajemen kas negara, yaitu Laporan Proyeksi PNBP.

Dengan demikian, upaya optimalisasi PNBP harus sejalan dengan tujuan perbaikan tata kelola PNBP sebagaimana ketentuan PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.





Meraba Kinerja BUMN Penyetor PNBP 2024

Hellington,
Direktorat PNBP SDA & KND





Dalam Nota Keuangan (NK) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) diusulkan sebesar Rp80,8 triliun. Berdasarkan Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya dinaikkan menjadi Rp85,8 triliun.

Peningkatan target PNBP KND sebesar Rp5 triliun menambah tantangan bagi Menteri Keuangan selaku Instansi Pengelola PNBP (IP PNBP) pendapatan KND dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kementerian Teknis yang mewakili pemerintah selaku Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dan/atau pemilik modal pada Perum/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNBP KND dipengaruhi oleh kinerja laba BUMN. Dari kinerja Tahun Buku 2023 akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dan salah satu agendanya adalah penetapan penggunaan laba tahun 2023. Dalam hal pemegang saham menyetujui pembagian laba tahun 2023 kepada pemegang saham, maka selaku pemegang saham BUMN pemerintah akan menerima dividen.

Pada 2023, jumlah BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN dicitkan menjadi 41 perusahaan dan jumlah BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebanyak 6 perusahaan. Namun, jumlah BUMN yang melakukan penyetoran dividen relatif sedikit. Dari tahun ke tahun, BUMN yang menjadi penyetor dividen terbesar tidak mengalami perubahan signifikan. Pada 2022, 10 penyetor dividen terbesar menyumbang sebesar Rp39,3

triliun atau 96,91% dari total setoran dividen. BUMN Perbankan menyumbang 60,54% sedangkan sisanya dari BUMN Non Perbankan seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT Pertamina, PT Inalum (MIND ID), PT PLN (PLN), PT Pupuk Indonesia (PIHC), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).

Berdasarkan publikasi APBN Kita September 2023, realisasi PNBP KND sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp65,5 triliun atau 133,3% dari target APBN 2023. Kenaikan ini utamanya berasal dari dividen BUMN Perbankan Rp40,8 triliun dan BUMN nonperbankan Rp24,6 triliun. Realisasi PNBP KND tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp81,5 triliun sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2023, PNBP KND tahun 2023.

Sekilas tentang Perencanaan Target Dividen BUMN

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan PNBP Dari KND Oleh Bendahara Umum Negara, yang mengatur *end to end business process* pengelolaan PNBP KND, pengelola PNBP adalah Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan selaku Pimpinan IP PNBP. Selanjutnya, Menteri Keuangan selaku Pimpinan IP PNBP menunjuk Direktur Jenderal Anggaran (DJA) sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Selaku pengelola fiskal Menteri Keuangan memiliki kewenangan, antara lain menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP; menetapkan Rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan APBN; melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP; meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP; dan melaksanakan



kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJA sebagai Pejabat Kuasa Pengelola bertugas untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana PNBPN; mengusulkan Rencana PNBPN dalam bentuk Target PNBPN kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal; memungut dan menyetorkan PNBPN ke kas negara; mengelola piutang PNBPN; melaksanakan pertanggungjawaban PNBPN kepada Menteri Keuangan; dan/atau melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengelolaan PNBPN dari KND, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan dapat meminta data dan informasi kepada Kementerian BUMN, yang antara lain data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana PNBPN dalam penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan perubahan APBN; data dan informasi dalam rangka verifikasi atau monitoring atas pembayaran dan penyetoran PNBPN; data dan informasi dalam rangka pengawasan PNBPN, pemeriksaan PNBPN, dan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan PNBPN atau hasil pemeriksaan PNBPN; dan data dan informasi lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan PNBPN dari KND.

Perencanaan PNBPN dari KND meliputi kegiatan penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN dan penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/ atau rancangan perubahan APBN. Rencana PNBPN disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengikuti siklus APBN.

DJA bersama Kementerian BUMN melakukan penelaahan atas usulan Rencana PNBPN dalam

proses tersebut DJA dapat mengikutsertakan instansi/unit terkait dan dalam rangka pendalaman atas usulan Rencana PNBPN. Selain itu DJA, dapat meminta data dan informasi dari BUMN dan/atau pihak lain. Hasil penelaahan dan pendalaman atas usulan Rencana PNBPN menjadi salah satu bahan penetapan Menteri Keuangan atas Rencana PNBPN dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN. Rencana PNBPN bersifat dinamis hingga RUU APBN yang diajukan pemerintah ditetapkan menjadi UU APBN oleh DPR.

Dalam hal hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR atas RUU APBN, terdapat perubahan Rencana PNBPN DJA meminta Kementerian BUMN melakukan pemutakhiran Rencana PNBPN berdasarkan UU APBN.

Dalam NK RAPBN 2024, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah kebijakan antara lain transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek environmental social governance (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan, serta penguatan early warning untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

Kinerja Semester I Tahun 2023

Prospek pemulihan ekonomi global hingga paruh pertama tahun 2023 masih tertahan dan masih dibayangi dengan ketidakpastian. Namun demikian, prospek ekonomi nasional masih tetap terjaga dilihat dari kegiatan perekonomian dan optimisme masyarakat. Dalam 22 bulan berturut-

turut, indikator ekonomi PMI Manufaktur secara konsisten terus mengalami ekspansi dan pada Juni 2023 pada level 52,5. Penguatan aktivitas manufaktur nasional didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di atas zona optimis (≥ 100) yakni sebesar 127,1.

Pertumbuhan ekonomi semester I-2023 tetap resilien, tumbuh konsisten sebesar 5,2%. Hal ini mendorong kinerja BUMN. Meskipun demikian kinerja keuangan BUMN masih dibayangi risiko pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar AS.

Perkembangan makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMN sektor keuangan meliputi empat variabel utama yaitu inflasi, suku bunga, valas, dan

pertumbuhan domestik Bruto (PDB). Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan margin pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi margin pendapatan perbankan. Selain itu, kinerja BUMN sektor energi dan transportasi dipengaruhi kenaikan harga minyak.

Dalam acara *BUMN Performance Report 2023* CNBC Indonesia, dikutip Senin (4/9/2023), Kementerian BUMN mencatat laba konsolidasi atau keseluruhan BUMN pada Semester 1 2023 telah mencapai Rp 180 triliun (*unaudited*). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo.

Berdasarkan publikasi Laporan Keuangan dan informasi tentang kinerja BUMN Semester I Tahun 2023, diperoleh data laba bersih beberapa BUMN penyeter dividen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Laba Bersih BUMN PNBP Semester I Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)

No	Nama BUMN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Des 2022	31 Des 2021	Growth YoY (%)	Growth YoY (%)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a):(b)	(f)=(c):(d)
1	BMRI	27.704	22.044	44.952	30.551	25,67	47,14
2	BBRI	29.561	24.876	51.408	30.756	18,83	67,15
3	BBNI	10.399	8.872	18.482	10.977	17,21	68,37
4	BBTN	1.474	1.471	3.045	2.376	0,23	28,15
5	TLKM	16.821	17.555	27.680	33.948	-4,18	-18,46
6	SMGR	891	884	2.499	2.117	0,78	18,04
7	JSMR	1.016	529	2.324	871	91,96	166,71
8	PLN	25.917	17.380	14.415	13.175	49,12	9,41
9	PERTAMINA	37.000	22.701	63.865	31.942	62,99	99,94
10	PIHC	3.972	11.932	18.511	5.135	-66,71	260,50
11	MIND ID*	5.330	12.300	22.495	14.325	-56,67	57,03
		160.086	140.545	269.676	176.173	13,90	53,07

*) sd triwulan I 2023

Sumber : Publikasi laporan keuangan BUMN (diolah)

Dari 11 BUMN tersebut, di atas laporan kinerja Semester I 2023 yang tidak tersedia adalah MIND ID, dari 10 BUMN hanya dua BUMN yang mengalami penurunan kinerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2022, yaitu TLKM dan

PIHC. Secara total, peningkatan kinerja semester I tahun 2023 dari BUMN tersebut sebesar 13,9%.

Untuk memperoleh proyeksi kinerja BUMN tahun 2023 dapat diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh manajemen BUMN, sedangkan untuk melihat

dari sisi pandang pihak independen dapat dilihat dari laporan riset *Analyst*. Menjadi menarik untuk melihat perspektif *Analyst* tersebut. Penulis mengambil data dan informasi yang

tersedia melalui terminal Refinitiv Eikon. Di mana pada terminal tersebut diperoleh data estimasi kinerja beberapa BUMN yang berstatus Perusahaan Terbuka, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 : Estimasi Laba Bersih BUMN Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)

	BBNI	BBRI	BMRI	BBTN	TLKM	SMGR	JSMR	Total BUMN Listed
Custom Calculated Mean	20.993	58.674	49.071	3.242	26.163	2.778	2.168	163.089
SmartEstimate®	20.888	58.763	49.473	3.170	25.941	2.761	2.304	163.300
Mean	21.033	58.630	49.073	3.234	26.133	2.818	2.135	163.056
Predicted Surprise %	- 0.69	0.23	0.82	- 1.97	- 0.74	- 2.02	7.90	
Median	21.179	58.588	49.269	3.202	25.725	2.774	2.158	162.894
Low	19.425	55.965	46.558	2.937	24.615	2.348	1.622	153.470
High	22.004	62.314	51.356	3.507	28.719	3.218	2.775	173.894

Sumber : refinitiv eikon (diolah)

Dengan menggunakan nilai rata-rata dari beberapa laporan *Analyst* diketahui estimasi laba bersih 2023 dari 7 BUMN sebesar Rp163,3 triliun, jika dibandingkan dengan kinerja laba bersih tahun 2022 maka terdapat dua BUMN yang berpotensi mengalami penurunan kinerja laba bersih. Tentunya, hasil estimasi ini cukup menggembirakan dan memberikan optimisme bahwa kinerja BUMN tahun 2023 meningkat.

Untuk 3 BUMN penyeter dividen besar lainnya yaitu Pertamina, PLN dan PHIC, terdapat ketergantungan usaha sangat erat ketiga BUMN dengan Pemerintah, dikarenakan BUMN tersebut mendapat penugasan dari pemerintah dengan imbalan pembayaran subsidi dan/atau kompensasi. Kelancaran pembayaran subsidi dan/atau kompensasi akan memengaruhi kinerja BUMN tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memastikan pembayaran subsidi dan/atau kompensasi dapat dilakukan secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan negara.

Tanggung jawab terhadap pencapaian realisasi PNBPN dari KND sesuai dengan Rencana PNBPN yang ditetapkan dalam UU APBN/UU Perubahan APBN berada di tangan Kementerian BUMN dan

IP PNBPN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Capaian PNBPN KND 2024 masih *challenging*, dengan menggunakan asumsi tingkat *Dividend Payout Ratio* (DPOR) sama dengan penetapan dividen di tahun 2023. Disisi lain, terdapat wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dalam pembagian dividen dan mengkomunikasikannya kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pemantauan dan pengawasan capaian kinerja BUMN tahun 2023, sesuai dengan kewenangannya maka IP PNBPN KND dan Kementerian BUMN harus bersinergi dalam mengawal pencapaian RKAP serta mendorong BUMN untuk melakukan mitigasi tidak tercapainya target-target RKAP.

Kedua, upaya penguatan pengawasan baik oleh organ pengawasan internal dan pihak eksternal serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulan yang bisa diakses publik.

Ketiga, mendorong keberhasilan transformasi BUMN yang dijalankan Kementerian BUMN



dalam meningkatkan kinerja BUMN. Harapannya seluruh BUMN harus mampu menghasilkan laba sehingga dapat berkontribusi kepada setoran dividen.

Keempat, mendukung penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum dan pencegahan terjadi KKN di lingkungan BUMN dan entitas anak.

Kelima, besaran DPOR yang cukup tinggi dan berlanjut sampai sekarang mendukung capaian setoran dividen bagi negara, namun harus tetap diukur dampaknya terhadap kondisi keuangan BUMN, dalam hal dirasa perlu DPOR tinggi dapat

dikurangi dan BUMN tersebut dapat mengalokasikan penggunaan labanya untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kinerjanya di masa datang.

Keenam, melihat praktik penyetoran dividen oleh BUMN Perbankan pada semester I Tahun 2023 sehingga pemerintah dapat menggunakan penerimaan PNBPN tersebut untuk membiayai belanja dengan segera, maka hal tersebut layak diterapkan bagi BUMN lainnya untuk menyegerakan penerbitan Laporan Tahunan, dan menyelenggarakan RUPS, sehingga dividen dapat segera diterima negara.



JASA LAYANAN VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Tulus Basuki, Direktorat PNBK K/L

Sejalan dengan adanya arahan Presiden terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan sesuai amanah peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri utamanya untuk mendorong penguasaan pasar dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor, perlu menjadikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah yang harus dijalani secara konsisten.

Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang salah satu tugas dan fungsinya membina kemampuan industri dalam negeri melakukan beberapa langkah

kebijakan pada tahun ini. Diharapkan dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah dan masyarakat akan mengurangi ketergantungan impor sehingga kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional dapat tercapai.

Beberapa regulasi aturan yang mendasari layanan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 86: Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, dan BU Swasta wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 97: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40%



- produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, Pasal 61: Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%.
 - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66: Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri.
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Pasal 2 menyatakan bahwa dalam melakukan penghitungan dan verifikasi TKDN dan nilai BMP, Menteri menunjuk Lembaga Verifikasi Independen. Pasal 3 menyatakan bahwa lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk terdiri dari: (i) LVI di bawah kementerian/lembaga dan (ii) LVI berbentuk Badan Usaha.
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, berisi instruksi teknis kepada semua pimpinan instansi pemerintahan dalam rangka mempercepat peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
 - Arahan Presiden terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri, di antaranya dalam: (i) Rakernas Kementerian Perdagangan Tahun 2021, 4 Maret 2021; (ii) Pidato Presiden pada Rakernas HIPMI, 5 Maret 2021; (iii) Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI,

- 16 Agustus 2022; dan (iv) Pengarahan Presiden kepada KADIN seluruh Indonesia, 23 Agustus 2022, yang menyampaikan bahwa “...kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan; Anggaran APBN, anggaran BUMN, belanja APBN belanja APBD belanja BUMN, harus dan wajib beli produk dalam negeri; Memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Upayakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95% atau senilai 1,171 Triliun.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri: Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi.

JASA LAYANAN VERIFIKASI TKDN

Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pada Bagian Keempat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri telah diamanatkan bagi Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta wajib untuk menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini dimaksudkan dalam rangka upaya meningkatkan produk dalam negeri.

Layanan jasa verifikasi/validasi merupakan salah satu peluang layanan dengan potensi penerimaan yang besar pada Kementerian Perindustrian. Peraturan Presiden RI No. 12

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat b, bahwa Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Peningkatan penggunaan PDN akan mendorong pertumbuhan produk dalam negeri. Untuk mendukung hal tersebut, sertifikasi TKDN akan semakin dibutuhkan, sehingga potensi *user* untuk verifikasi TKDN/PDN cukup besar.

Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya layanan verifikasi TKDN/PDN akan diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian melalui mekanisme kontrak kerja sama dengan pihak industri. Dalam kontrak kerjasama tersebut disepakati biaya verifikasi dengan pertimbangan biaya yang ditetapkan tidak memberatkan pihak industri (*willingness to pay*) dan sesuai dengan bobot pekerjaan. Industri yang menjadi sasaran layanan verifikasi TKDN/PDN akan menjadi pertimbangan terkait kompleksitas dan dampak produksi, sehingga rata-rata merupakan kelompok industri

menengah dan besar di mana pembiayaan ini akan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap total komponen produksi sehingga tidak akan mempengaruhi harga jual barang kepada masyarakat.

Tarif tersebut dikenakan ke seluruh pelanggan yang meminta layanan baik untuk industri menengah dan besar. Khusus untuk industri kecil yang meminta layanan verifikasi TKDN/PDN sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka dibuat mekanisme keringanan biaya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Tujuan layanan verifikasi TKDN yakni memberikan verifikasi atas kandungan komponen dalam negeri dan membantu industri untuk mendapatkan fasilitas sertifikasi TKDN. Adapun *user* (pengguna layanan) dimaksud yaitu Industri utamanya industri besar dan menengah yang memerlukan sertifikasi TKDN.

Ada beberapa manfaat terhadap penggunaan layanan verifikasi TKDN, antara lain: (1) membantu industri untuk mendapatkan sertifikat TKDN yang salah satunya diperlukan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) membantu industri untuk dapat meningkatkan pangsa pasar produknya; (3) membantu industri mendapatkan layanan lebih cepat, berkualitas, dan kompetitif dikarenakan permintaan TKDN yang diperkirakan sangat banyak ke depannya; (4) meningkatkan daya





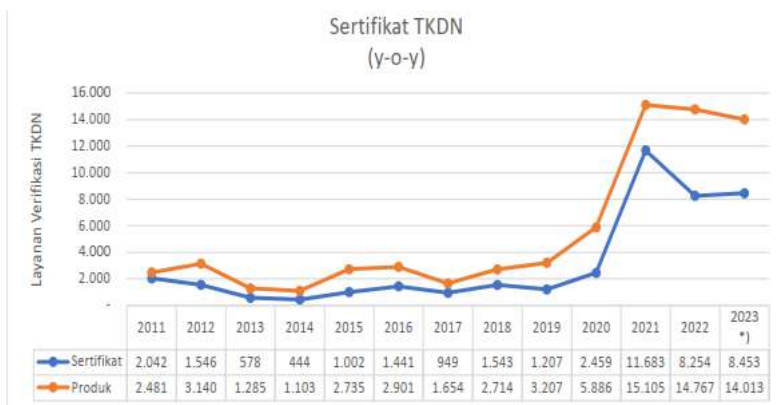
saing industri Dalam Negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Dampak Tarif Layanan Verifikasi TKDN Pengenaan Tarif Verifikasi TKDN diterapkan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan sehingga diharapkan tidak memberatkan industri karena telah sesuai dengan bobot pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, industri justru akan terbantu dengan adanya tarif yang kompetitif karena besaran tarif telah mempertimbangkan besaran tarif kompetitor.

Jika tidak dilakukan layanan verifikasi TKDN akan berdampak pada (1) adanya antrean yang menyebabkan industri tidak mendapatkan tarif layanan dengan cepat dikarenakan keterbatasan jumlah Lembaga Verifikasi Independen (LVI), sementara potensi permintaan semakin besar ke depannya; (2) industri tidak mendapatkan tarif yang kompetitif; (3) industri akan terhambat untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Potensi permintaan layanan verifikasi TKDN sangat besar, antara lain dikarenakan: i. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah

Nonkementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, dan BU Swasta. ii. Semakin meningkatnya kesadaran industri untuk mendapatkan sertifikasi TKDN dalam rangka meningkatkan mutu produk dan jangkauan pasarnya. iii. Semakin digalakkannya program percepatan penggunaan produk dalam negeri terutama sejak tahun 2021 (Sertifikasi produk TKDN meningkat pesat dengan sebagaimana grafik terlampir). iv. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri akan mendorong daya saing dan pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk mendukung hal tersebut, verifikasi TKDN akan semakin dibutuhkan, sehingga potensi pelanggan untuk layanan verifikasi TKDN cukup besar. v. Adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah akan mendorong produsen untuk mensertifikasi TKDN produknya, maka potensi pelanggan untuk layanan verifikasi TKDN ke depannya sangat besar. vi. LVI yang ditunjuk melakukan verifikasi TKDN saat ini baru 2 (dua) lembaga, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. vii. LVI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) akan segera ditetapkan untuk menjadi LVI TKDN. Dengan adanya LVI baru akan membantu industri untuk mendapatkan layanan lebih cepat.



Jumlah sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian meningkat pesat terutama sejak makin digalakkannya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

*) Data sementara (Jan sd 19 Sept 2023)

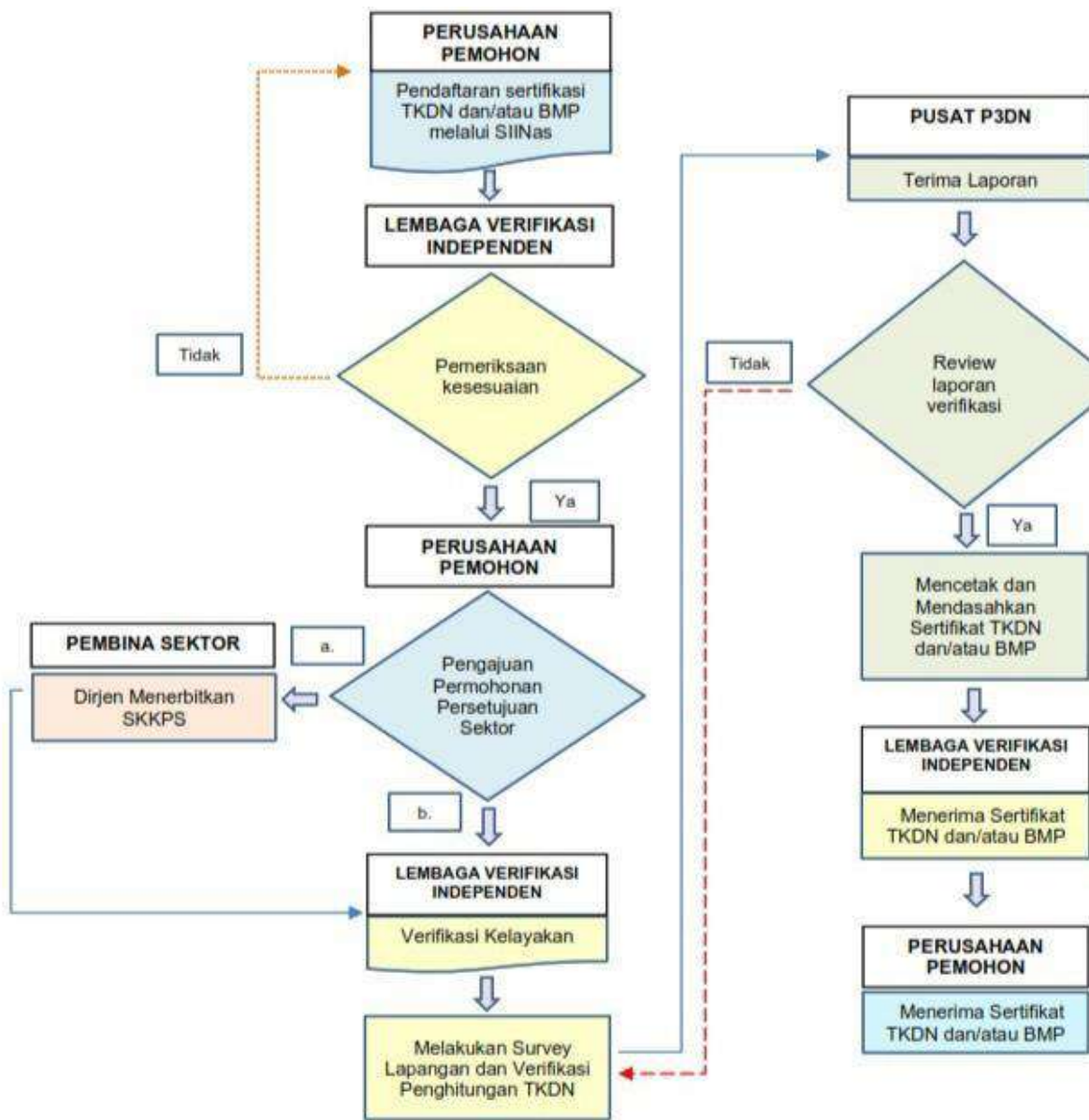
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen dalam Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BSKJI

dalam melakukan penghitungan dan verifikasi TKDN dan nilai BMP, Menteri menunjuk Lembaga Verifikasi Independen

LVI yang ditunjuk terdiri dari:
LVI di bawah Kementerian/ Lembaga.
LVI berbentuk Badan Usaha.

2. Kompleksitas pekerjaan memperhitungkan beberapa faktor di antaranya jumlah *Bill of Material* (BoM) dan jumlah komponen lokal dengan persentase biaya lebih dari 3% dari total biaya.

3. Standar biaya. Besaran biaya tim verifikator menggunakan acuan biaya *man/days* sesuai Standar Biaya Masukan Prosedur Standar Operasional Penerbitan Sertifikat TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).



Melalui uraian terkait layanan jasa verifikasi TKDN pada Kementerian Perindustrian di atas, diperoleh gambaran bahwa jasa layanan verifikasi TKDN ini ke depannya merupakan salah satu potensi PNBPN yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Selain itu, layanan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam upaya menjaga produk dalam negeri, sehingga

diharapkan dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah dan masyarakat akan mengurangi ketergantungan impor sehingga kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional dapat tercapai.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEAMANAN DATA # APLIKASI SAKTI

Kami Selalu Menjamin Kerahasiaan Data Setiap
Pengguna Aplikasi SAKTI

[Klik di sini untuk informasi lebih lengkap](#)



Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024

Angling N. Kemenangan, Direktorat Penyusunan APBN

Foto: PhotoMIX Company Pexel

Pada 7 Agustus 2023 yang lalu, Direktorat Jenderal Anggaran telah menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024 yang dikemas dalam bentuk Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi-*Budget Goes to Campus* (PSBB-BGTC). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Teguh Rahayu (Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II, Direktorat Penyusunan APBN), Wahyu Widjayanto (Ketua Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan), dan Mulyanto (Kepala Kantor Hukum sekaligus Dosen UNS), dengan mengundang peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa, K/L, Pemda, LSM FITRA, hingga masyarakat umum lainnya. Kegiatan konsultasi publik RUU APBN

tersebut adalah kali kedua, setelah sebelumnya diselenggarakan di tahun 2023.

Menarik untuk disimak, sebenarnya apa urgensi dan esensi dari kegiatan konsultasi publik tersebut. Menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi diartikan sebagai keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Sedangkan esensi bermakna hakikat, inti, dan hal yang pokok. Kata esensi berasal dari bahasa latin "essentia" yang artinya ada. Dengan kata lain, sebenarnya hal sangat penting apa yang menjadikan konsultasi publik itu harus dilaksanakan, dan apa hakikat dari keberadaan konsultasi publik itu sendiri? Untuk memahami, pertama-tama, kita harus tahu definisi dari konsultasi publik terlebih dahulu. Dalam draf Rancangan



Permenkumham tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsultasi publik diartikan sebagai kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap maupun proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dalam rancangan Permenkumham tersebut, telah diakomodir ketentuan tentang adanya kewajiban instansi pemrakarsa untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik pada tahap pembahasan

RUU yang diprakarsai oleh pemerintah, baik melalui forum tatap muka maupun dialog langsung yang melibatkan masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan.

Apabila kita tarik lebih jauh ke belakang, keberadaan konsultasi publik sendiri sebenarnya merupakan amanat dari UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 13/2022. Dalam Pasal 96 UU tersebut, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam suatu pembentukan perundang-undangan. Masukan tersebut dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, baik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, diskusi, seminar, maupun lokakarya. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji materi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, semakin menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak atas jaminan adanya partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Dalam rangka mewujudkan *meaningful participation* tersebut,



Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2024

setidaknya ada tiga hak utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yakni hak untuk didengar pendapatnya (*right*

to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Putusan MK tersebut sejalan dengan UU 13/2022 (bagian penjelasan umum), yakni bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga hak utama masyarakat tersebut.

Dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi publik menjadi prinsip utama dan konsekuensi logis sebuah negara hukum lainnya Indonesia. Konsultasi publik dipandang sebagai pengejawantahan terjaminnya hak partisipasi publik di bidang pemerintahan dan akuntabilitas, serta sarana kontrol masyarakat atas proses pembentukan undang-undang sebelum disahkan/diberlakukan. Menurut Maria Farida Indrati S., masyarakat sendiri diartikan sebagai orang pada umumnya (terutama masyarakat yang rentan dan terdampak langsung dari suatu kebijakan), setiap orang/lembaga terkait, serta setiap lembaga swadaya masyarakat terkait.

Pada hakikatnya, secara sosiologis masyarakat adalah *stakeholder* kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam perumusan kebijakan karena masyarakatlah yang dianggap paling tahu tentang dirinya dan masalah yang sedang dihadapinya, serta paling merasakan langsung manfaat ataupun dampak dari suatu kebijakan. Dengan asumsi kebijakan publik adalah untuk menanggulangi masalah publik, maka sudah sepatutnya kebijakan publik tersebut berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapi akibat dampak suatu kebijakan dan sekaligus diberikan kesempatan untuk menawarkan alternatif solusinya, tidak hanya semata dari sudut pandang pembuat kebijakan. Dengan demikian, maka peraturan yang dibuat akan lebih dapat diterima oleh publik dan memiliki daya berlaku yang lebih efektif/implementatif. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan yang dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak akan optimal, seperti pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.

Secara umum ada tiga manfaat penting partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu pertama, terciptanya kebijakan publik yang lebih optimal. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat akan memberikan dasar penyusunan suatu kebijakan yang lebih baik, serta menjamin implementasi yang lebih efektif karena masyarakat lebih mengetahui kebijakan yang akan ditempuh dan merasa ikut terlibat dalam perumusannya. Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif. Pelibatan publik memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih mengetahui rencana kebijakan pemerintah, kesempatan agar pendapat mereka didengar, serta dapat memberikan masukan yang solutif pada perumusan kebijakan pemerintah. Hal ini menjadikan kebijakan akan diterima secara lebih luas, sekaligus menunjukkan itikad baik keterbukaan dari pemerintah. Legitimasi pemerintah dan DPR akan meningkat karena lebih dapat dipercaya.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih melibatkan banyak pihak dalam penyusunan kebijakan, salah satunya adalah melalui kegiatan konsultasi publik, yakni mekanisme meminta dan menerima umpan balik dari berbagai kalangan dalam suatu penyusunan kebijakan. Cakupan peserta konsultasi publik biasanya lebih luas, mulai dari kelompok sasaran utama yang terkena kebijakan, akademisi, eksekutif, legislatif, LSM, hingga organisasi masyarakat tertentu. Melalui konsultasi publik, akan diperoleh masukan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak serta dapat lebih mengetahui apakah suatu kebijakan berbenturan atau merugikan pihak tertentu atau tidak. Mekanisme konsultasi publik harus dianggap sebagai mekanisme formal, yakni difasilitasi oleh pemerintah atau legislatif sebagai pihak yang memegang otoritas kuat. Melalui pelibatan komunitas, kelompok profesional, dan organisasi masyarakat lainnya, pemerintah/legislatif akan mendapatkan masukan yang komprehensif sesuai kondisi riil di lapangan. Ketiga, efisiensi sumber daya. Karena tingkat penerimaan dari masyarakat relatif tinggi, maka sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, dapat dihemat dan dialihkan untuk hal yang lebih strategis, misalnya peningkatan pelayanan publik dan penebalan perlintas.

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Mayoritas masyarakat masih belum memahami hak-hak mereka. DPR sebagai lembaga yang mendapat mandat dari konstituen dianggap sudah cukup menjadi wakil dari rakyat dalam penyusunan suatu kebijakan publik. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya sanksi tertentu dalam hal tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dan pendampingan dari organisasi masyarakat sipil dalam mendorong masyarakat agar lebih semakin paham dalam menggunakan haknya, serta dapat lebih terlibat dalam setiap perumusan kebijakan publik. Pendampingan tersebut dapat dimulai dari mengeksplorasi permasalahan yang sedang dihadapi warga, menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan, mengelaborasi berbagai alternatif solusi, hingga perumusan dalam sebuah formulasi kebijakan.

Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, proses perencanaan dan perumusan APBN juga membutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik. Perspektif publik sangat dibutuhkan sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi *good governance* dan penguatan partisipasi publik dalam penyusunan RUU APBN TA 2024 yang semakin lebih kredibel dan transparan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat berdasarkan hasil rewiu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2022, masih terdapat catatan penting bahwa pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik terutama terkait hasil penilaian *Open Budget Survey* (OBS) 2021 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* (IBP). Penilaian tersebut hanya memberikan skor 24 dari skala 100 untuk tingkat partisipasi publik di Indonesia atau termasuk kategori rendah. Sebagai upaya penguatan partisipasi publik, IBP memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: (1) Pemerintah perlu melibatkan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil yang mewakili; (2) Aktif melibatkan komunitas yang rentan atau kurang terwakili baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan yang mewakili komunitas tersebut; dan (3) Melakukan konsultasi publik terkait isu-isu

seputar anggaran, seperti kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.

Konsultasi Publik RUU APBN, merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menyosialisasikan, memberikan gambaran, dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok pengaturan dan muatan kebijakan strategis dalam RUU APBN TA 2024, seperti peran vital APBN sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global menuju penguatan ketahanan fiskal dan percepatan transformasi ekonomi. Selain itu, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk melihat persepsi dan ekspektasi awal masyarakat, menampung harapan publik, memberikan penguatan partisipasi publik, dan bagian implementasi *good governance* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pokok-pokok pengaturan RUU APBN, serta terjaminnya *meaningful participation*, melalui terpenuhinya tiga hak utama, yakni *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya guna memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pokok-pokok pengaturan RUU APBN dan berdiskusi dengan para narasumber dan pemerintah pengambil kebijakan.

Sebagai catatan, guna semakin mengoptimalkan penguatan partisipasi publik, konsultasi publik ke depan diharapkan dapat lebih melibatkan dan/atau mengundang komunitas rentan atau kurang terwakili baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan yang mewakili komunitas tersebut. Komunitas rentan adalah kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. UU 39/1999 tentang HAM mendefinisikan kelompok masyarakat rentan sebagai orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas. Keberadaan komunitas ini biasanya karena aset dan akses yang terbatas sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Akhir kata, partisipasi publik akan mendorong terciptanya komunikasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah dan keterbukaan informasi yang lebih baik dalam menyediakan gagasan baru, serta memperluas pemahaman yang lebih komprehensif atas suatu isu tertentu. Partisipasi publik tercermin dari kesempatan untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan, serta peluang untuk melakukan kajian/reviu atas suatu rancangan

kebijakan. Dengan demikian, partisipasi publik akan mengurangi potensi terjadinya konflik/resistensi atas adanya suatu kebijakan dan sekaligus menjadi wujud akuntabilitas pemerintah. Melalui kegiatan konsultasi publik tersebut, juga diharapkan skor OBI Indonesia atas partisipasi publik dapat meningkat. Sebagai penutup, Najwa Shihab, jurnalis ternama Indonesia pernah berkata, “Kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan, selama kepemimpinan penuh dengan keterbukaan.”





COFFEE

Trends & Most Favorite Recipее

Adhelia Shalsabila
Sekretariat DJA

People who make drinking coffee from a coffee shop a lifestyle feel that something needs to be added when the motivation that drives their self-satisfaction is not achieved, namely when they don't drink coffee from a coffee shop. Following existing trends is also one of the behaviors that encourage consumer behavior among young adults. They feel that something is missing when they cannot fulfill these satisfactions.

The increasing level of coffee consumption is also inseparable from the style of urban people who like to congregate. The trend of drinking coffee is still quite popular, as seen from the proliferation of cafes and coffee shops. This enormous consumption of coffee resulted in the rise of coffee houses. The coffee house offers not only unique and delicious coffee but also a beautiful interior design that millennials love.

There are many types of coffee spread throughout the archipelago. Starting from Medan coffee, Toraja coffee, Aceh coffee, and many other types of coffee. So, it is unsurprising that the trend of drinking coffee will last quite a long time, surpassing the trend of consuming other foods and drinks.

Before carrying out routine activities, such as in the office, many people are accompanied by coffee before work and find inspiration. Coffee helps an active and dynamic generation be more enthusiastic about activities. When drinking coffee, they find it easier to find inspiration.

Coffee has already become my working buddy.

Who's with me?



When we start work, when we start a meeting, when we meet with friends, as a coffee lover, a cup of hot coffee is usually prepared to accompany and provide inspiration in pouring out ideas or completing work.

A cup of coffee at work is very closely related. It can increase work productivity because it contains caffeine in it.

The caffeine content in coffee does improve concentration and memory.

On the one hand, coffee also has good benefits for the body. Still, on the other hand, we are not advised to drink too much coffee, which will harm our health.

Regardless of the debate regarding which has more positive or negative impact, drinking coffee is starting to become part of a lifestyle until it has become a primary need for some people. Being addicted to caffeine is considered a productivity booster at work, so if they miss the ritual of drinking coffee for even one day, they will feel less productive, even to the point of not being enthusiastic about carrying out activities.

Like other hobbies, coffee drinkers must be willing to spend much money to fulfill this need. Not to mention if you need more than one portion of coffee a day: in the morning before starting activities, in the afternoon or evening buying cold coffee via an online food ordering application to keep your spirits up while working, or in the evening when a friend asks you to meet at a coffee shop.

Suggesting to stop drinking coffee is certainly not the primary way that can be easily achieved to save money. After all, simply blocking this habit will impact the daily lives of these coffee connoisseurs, decreasing productivity for example.

Have you ever thought about making your own coffee? As we know, making coffee takes work. However, that doesn't mean you can't learn it, you know. Using YouTube or Google, you can quickly find information about coffee, from types to how it is made.



To make your coffee, you need tools such as a coffee grinder, a French press, and roasted coffee beans. For a coffee grinder, just use the manual version because you only grind coffee beans for yourself and in small quantities. As for brewing equipment, the French press is relatively easy for beginners.

Preventive alert: I'm not a hardcore coffee lover. Yes, I do love enjoying coffee, but I am more likely a milky coffee-type of person, or whatever you call it. I like a strong cappuccino better. You know what I'm sayin'?

Know The Basic: Espresso

Espresso is an extract from coffee beans processed using a high-pressure machine. Therefore, you could say that espresso is the essence of coffee beans in the form of a cup of liquid coffee that is dense and thick in a single-shot cup or double-shot cup.

Espresso is an extract from coffee beans processed using a high-pressure machine. Therefore, you could say that espresso is the essence of coffee beans in the form of a cup of liquid coffee that is dense and thick in a single-shot cup or double-shot cup.



It's not the coffee beans that distinguish espresso from other coffee drinks. Due to the popularity of this drink, espresso is often used as the main topic of marketing coffee beans, making some people feel that the result of brewing special coffee beans is automatically called espresso. And, of course, you can actually make espresso from any beans that you like.

A mixture of coffee beans is indeed an important thing to make a fragrant cup of coffee with maximum taste, but that doesn't mean that a blend of sure coffee beans means that the brewed coffee can be called espresso. Even though certain mixtures of coffee beans are specifically made to make high-quality espresso, without going through the extraction process of an espresso machine, the resulting coffee bean mixture is not espresso.

Then comes roasting. In California, you can see espresso with dark-roasted coffee beans. On the East Coast of the United States, espresso with light-roasted coffee beans is more popular. Meanwhile, in Northern Italy, medium roast coffee beans are more often used, so you can say that you can use coffee beans with any roast level according to your taste to make espresso.

Some people with more budget would probably purchase a coffee maker, which is obviously super expensive. But in this column, I would like to inform you about the particular way I like the most to make my coffee. Yep, French press.

1. Fresh Coffee Beans Would be Nice.

Coffee beans left open for a long time will not have the same taste and aroma as beans placed in

an airtight container. For best results, use freshly ground coffee, not ground coffee that has been ground for days. You need to grind coffee just before brewing for maximum results. This is done so that the aroma and taste are still fresh. Ensure not to grind the coffee beans too finely because it can clog the filter on the French Press. Medium is the right choice.

2. Your Coffee, Your Own Measurement

You can measure the water and coffee you like. For me, 250ml water, you can put 18- 20 grams of coffee. However, if you want to feel a strong coffee taste, you can reduce the water or add coffee. Try experimenting with coffee flavors! You don't need to always follow a guidebook, make your own coffee flavor according to your taste.

3. Brew Brew Brew

Put the coffee grounds you have ground into the bottom of the French press and add $\frac{1}{3}$ of water. Let the water and coffee sit for 30 seconds and stir slowly. For best results, let your coffee rest on a French Press for about 4 minutes before you enjoy it. (Generally, the water used to brew coffee is around 94 degrees Celsius, or simply boiling water that is left for 30 seconds.)

4. You're All-Set

After brewing, you can press the plunger firmly, slowly, and carefully. However, coffee you leave in the French press for too long can give a bitter taste, so you won't be able to enjoy it. You can take this espresso to the next level, you know, a variety of coffee drinks. Hereby my recipee...



Caramel Macchiato

An Iced Caramel Macchiato combines their full-bodied espresso with vanilla-flavored syrup, milk, and ice, topped with a caramel drizzle for an *glek glek* ahh finish. It's so creamy but not so sweet that you won't need to add sugar (which is always a plus). You can adjust it to your level of sweetness, too, just by using less caramel sauce and sugar free syrups.



Ingrédients

- 1 Pump Monin Caramel Syrup
- 2 Pump Monin Vanilla Syrup
- 240 ml Greenfields Fresh Milk
- 3/4 Glass of Ice
- 60 ml Starbucks Espresso Dark Roast
- As you Wish, On Top :
- Elle & Vire Unsweetened Vanilla Whipped Cream Fontana Frappucino Caramel Sauce

How To Make:

Just put those all ingredients into a grande size of glass (+- 500ml capacity). Hint: mind the order.

and mind your sugar consumption.



Seni Menjaga *Work-Life Balance* yang Optimal

Akhmad Tamzis Hudi,
Sekretariat



Di dunia kerja saat ini khususnya paska pandemi melanda, seringkali kita dihadirkan tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Meskipun demikian, kita memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang seimbang.

Untuk pelaksanaan tugas di kantor yang optimal dan kehidupan pribadi kita bahagia, kita dapat lakukan langkah-langkah tertentu yang biasanya kita temukan sendiri sejalan dengan kita melaksanakan tugas sehari-hari. Ada beberapa inisiatif yang bisa kita contoh dalam usaha tersebut, antara lain:

Pahami Tugas dan Prioritaskan:

Pertama-tama, pahami tugas dan tanggung jawab kita dengan jelas. Selalu prioritaskan pekerjaan yang memiliki dampak besar dan pastikan untuk menyelesaikannya dengan efisien.

Atur Jadwal dengan Bijak:

Buat jadwal kerja yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Manfaatkan alat manajemen waktu untuk membantu mengorganisir tugas-tugas sehari-hari.

Manfaatkan Fleksibilitas Sistem Kerja:

Dengan adanya mekanisme kerja yang fleksibel atau FWS, kita bisa memanfaatkan jatah waktu yang telah ditentukan untuk bekerja di luar kantor agar dapat sekaligus meningkatkan



Work Life

kualitas kehidupan pribadi, menambah waktu bersama keluarga sambil bekerja misalnya. Namun tetap harus konsisten dalam penyelesaian pekerjaan ya.

Istirahat yang Terjadwal:

Ambil istirahat sesekali untuk menghilangkan stres dan meningkatkan produktivitas. Manfaatkan waktu istirahat untuk berjalan-jalan sebentar atau melakukan kegiatan yang menyegarkan pikiran.

Berolahraga secara rutin:

Sisipkan kegiatan fisik dalam rutinitas harian, seperti berjalan kaki atau olahraga ringan. Pastikan untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental kita dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat.

Batasan Komunikasi di Luar Jam Kerja:

Tetapkan batasan yang jelas terkait komunikasi di luar jam kerja, namun tetap sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan ya.

Pengembangan Diri dan Pelatihan:

Jadikan waktu untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan kursus yang relevan dengan pekerjaan kita. Rencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kepuasan kerja Anda. Bisa kita manfaatkan fitur *open access e-learning* di KLC nya BPPK.

Berbagi Pengalaman dan Dukungan:

Jalin hubungan baik dengan rekan kerja dan teman sejawat untuk berbagi pengalaman dan tips. Terutama saling mendukung satu sama lain dalam mencapai *work-life balance* yang sehat.





Naik Gunung yang Gak Pakai Capek: Muncak ke Gunung Tangkuban Perahu

Akhmad Tamzis Hudi,
Sekretariat

Menginjakkan kaki di Gunung Tangkuban Perahu membawa petualangan yang tak terlupakan, dan salah satu destinasi yang paling menakjubkan adalah Puncak Kawah Ratu. Perjalanan menuju puncak ini bukanlah sebuah tantangan besar, karena di sinilah salah satu dari sedikit puncak gunung yang bisa dicapai menggunakan kendaraan bermotor. Yup, naik gunung gak pakai capek, ya muncak saja ke Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu.

Berada di sebelah utara kota Bandung, dengan ketinggian mencapai 2.084 meter cukup mudah diakses baik dari kota Bandung sendiri (-+ 25km dari pusat kota) maupun dari arah Kota Subang (- + 35km dari pusat Kota Subang. Walaupun ada kendaraan umum yang lewat sampai dengan gerbang kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu, secara umum moda transportasi yang paling mudah digunakan adalah kendaraan pribadi, baik roda dua, roda empat, atau roda enam alias Bus. Alternatif lainnya adalah





menggunakan transportasi umum seperti bus atau travel. Bus umumnya dapat diakses dari terminal-terminal kota besar seperti Terminal Leuwi Panjang di Bandung. Selain itu, ada juga layanan travel yang menawarkan perjalanan langsung menuju kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Travel ini umumnya memberikan kenyamanan ekstra dan seringkali dapat diakses di pusat kota.

Untuk kendaraan roda dua dan empat, bisa kita gunakan sampai ke puncak Kawah Ratu, sedangkan apabila menggunakan Bus, atau bila ragu dengan kesehatan kendaraan kita, bisa transit di Terminal Jayagiri, atau sebuah tempat transit prakir kendaraan besar di tengah-tengah rute naik dari pintu gerbang ke puncak. Di sini tersedia angkutan *Feeder* berupa mobil minibus sekelas Suzuki Elf yang wira wiri mengantar dan menjemput pengunjung ke dan dari puncak.

Ketika sampai di Puncak Kawah Ratu, kita disugahi pemandangan kawah vulkanik yang

mengeluarkan uap belerang menjulang tinggi. Keunikan geologi tempat ini menjadi daya tarik utama, dengan lereng-lereng hijau yang memikat dan warna keabu-abuan dari aktivitas vulkanik yang menciptakan lanskap yang menakjubkan.

Tidak hanya tentang keindahan alam, Puncak Kawah Ratu juga menyimpan kekayaan budaya lokal dan mitos yang memperkaya pengalaman kita. Interaksi dengan masyarakat setempat memberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, menambah dimensi kekayaan budaya tempat ini. Meskipun terletak di kawasan alam yang alami, Puncak Kawah Ratu menyediakan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan para pengunjung, menjadikan perjalanan ini selaras dengan keseimbangan antara petualangan dan fasilitas pendukung yang memadai.

Bagi para petualang, Puncak Kawah Ratu merupakan tempat yang ideal untuk merasakan keajaiban alam dan mengeksplorasi kekayaan budaya yang tersembunyi di setiap sudutnya.



Traveling

Melalui cerita pengalaman wisatawan, kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang bagaimana destinasi ini memberikan inspirasi mendalam bagi mereka yang berani menjelajahnya. Puncak Kawah Ratu, tanpa diragukan lagi, tidak hanya sebuah destinasi wisata, melainkan sebuah petualangan yang menghadirkan pesona luar biasa di tengah keindahan alam Jawa Barat yang memukau.

Penting untuk diingat bahwa cuaca dan kondisi jalan di sekitar Gunung Tangkuban Perahu dapat berubah, oleh karena itu, merencanakan perjalanan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan rute alternatif adalah langkah bijak. Dengan memilih transportasi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan perjalanan Anda, perjalanan menuju Puncak Kawah Ratu akan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan lancar.







APBN Kita

Matahari yang terbit di Papua
dan tenggelam di Aceh Darussalam
adalah matahari yang sama

Rembulan yang mekar menyinari hutan dan
belukar
Berkilauan di atas ombak dan gelombang
adalah rembulan yang sama

Merah putih yang berkibar megah
di halaman gedung indah
Dan merah putih yang melambai bersahaja
di pekarangan rumah sederhana
adalah merah putih yang sama

Di bawah matahari, rembulan dan bendera yang
sama
Di bawah proklamasi, tujuan dan cita-cita yang
sama
Di negeri gemah ripah loh jinawi dan kaya ini
Kita masih dan terus dihadapkan pada
pertanyaan,
Sudahkah anak-anak bangsa sama merasakan
hangat mentari pagi yang memberikan harapan?
Sudahkah anak-anak bangsa sama melihat indah
rona senja yang mengantarkan kedamaian?
Sudahkah malam-malam mereka tenang tanpa
mimpi-mimpi yang mengkhawatirkan?

Apa kabar pembangunan?
Sudah sampai di mana?
Rakyat mendapat manfaat apa?
Seberapa banyak air mata yang telah terusap?
Seberapa banyak senyum yang merebak?
Sudahkah APBN semakin mendekatkan kita
dengan tujuan?

Dan kita berkumpul disini,
bukan untuk mengulang pertanyaan
tetapi untuk memaknai diri kembali
di hari kelahiran yang baru kita tentukan
Sudahkah kita menjadi bagian dari solusi dan
jawaban?

APBN adalah janji yang kita kuantifikasi
tentang apa-apa yang ingin kita raih
Janji yang kita rawat dan jaga setengah mati
Agar tidak menjadi utang, agar terpenuhi ketika
temponya datang

Setiap lima tahun kita membuat rencana
Setiap tahun kita memeriksa kembali
data-data
Tetapi itu tidaklah cukup!
Tidak!



APBN tidak cukup hanya disusun dengan data-
data

Tetapi ia harus juga disusun dengan cinta
Karena cinta membangkitkan kesungguhan
Cinta menumbuhkan kepedulian
Karena dengan cinta, pemenuhan janji akan
semakin berarti

APBN harus menjadi harapan, tentang..
kemajuan
keamanan
kesejahteraan
keadilan
Tentang masa depan
Di saat berlebihan atau kekurangan
Di saat yang mudah maupun susah
Ia harus bisa menjadi pelita meskipun di saat
paling gulita
Ia mesti menjadi jalan keluar dari keadaan yang
menghimpit
walau hanya menyisakan celah yang sempit

APBN itu pelindung
Situasi bisa berganti dan kadang tidak bisa
diprediksi
Inflasi bisa tiba-tiba meninggi, harga komoditi
bisa melonjak tidak terkendali
Instabilitas kawasan dan timbulnya ancaman
keamanan
Pandemi yang mampu menciptakan badai
ekonomi
Tidak peduli, apapun situasinya

APBN harus punya kemampuan untuk
melindungi bangsa ini
dari keadaan yang buruk dan dampak yang bisa
lebih buruk lagi

APBN bukan sekedar angka-angka tanpa makna
APBN bukan hanya soal pendapatan dan belanja
Tapi ia adalah cara kita mewujudkan cita-cita
bangsa

Siapkah kita memberikan yang terbaik dari yang
kita punya
Melamari setiap data dan angka dengan cinta
Menjadikan APBN bukan hanya dari satu dua
sudut pandang saja
Tetapi utuh menjadi sesungguhnya APBN Kita
Kolaborasi semua anak bangsa untuk maju
sejahtera bersama
APBN Kita, untuk semua

Hari ini kita bertanya
Pada diri, pada waktu kemarin yang tidak bisa
kembali
Hari ini kita berjanji
Pada bangsa, pada hari depan yang ingin kita
banggakan

Pada negeri ini kita berjanji
Pada negeri ini kita berbakti
Pada negeri ini kita mengabdikan
Bagi negeri ini jangan ada air mata lagi
Hiduplah DJA
Majulah Indonesia

Rachmat Subarkah
Direktorat Anggaran Bidang PMK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SELAMAT HARI PAHLAWAN

10 NOVEMBER 2023



www.anggaran.kemenkeu.go.id

